

## LEMBAR PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Penerapan Elektronik *Government* Sebagai Media Promosi Pariwisata Berbasis Online di Kabupaten Manggarai Barat

Nama Mahasiswa : Yono

Nomor Stambuk : 105640203314

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Fakultas : Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Menyetujui :

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Rudi Hardi, S.Sos., M.Si

  
Nur Khaerah, SIP., M.IP

Mengetahui :

Dekan

Ketua Jurusan

  
Dr. Hj. Hyani Malik, S.Sos., M.Si

  
Dr. Nuryanti Mustari, S.IP., M.Si

## PENERIMA TIM

Telah diterima oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan/Undangan Penguji ujian skripsi Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar dengan Nomor : 0172/FSP/A.3-VIII/IV/42/2021 sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan dan memperoleh Gelar Sarjana (S1) dalam Program Studi Ilmu Pemerintahan di Makassar pada hari Selasa tanggal 27 April 2021.

### TIM PENILAI

Ketua

Sekretaris

  
Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si  
NBM. 730727

  
Dr. Burhanuddin, S.Sos., M.Si  
NBM. 1084366

### PENGUJI

1 Nasrul Haq, S.Sos., M.PA (Ketua)

  
(.....)

2 Handam, S.IP., M.Si

  
(.....)

3 Ahmad Harakan, S.IP., M.HI

  
(.....)

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Yono  
Nomor Stambuk : 1056402033 14  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

“Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa karya ilmiah ini adalah hasil penelitian saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya atau telah ditulis/dipublikasikan oleh orang lain atau melakukan plagiat.

Pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan aturan yang berlaku”.

Makassar, 22 Maret 2021

Yang Menyatakan



YONO

## ABSTRAK

**Yono.2021. Penerapan *Electronic Government* Sebagai Media Promosi Pariwisata Berbasis Online di Kabupaten Manggarai Barat (dibimbing oleh Rudi Hardi dan Nur Khaerah)**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan elektronik *government* sebagai media promosi pariwisata berbasis online di Kabupaten Manggarai Barat. Penelitian ini menggunakan beberapa indikator seperti dimensi kebijakan, dimensi kelembagaan, dimensi infrastruktur, dimensi aplikasi dan dimensi perencanaan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun yang dijadikan sebagai informan penelitian adalah dari Dinas Informasi dan Komunikasi dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai Barat. Berdasarkan hasil penelitian, indikator dimensi kebijakan yang berkaitan dengan penerapan *elektronik government* di bidang promosi pariwisata yang ada di Kabupaten Manggarai Barat, mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018, Peraturan Bupati Kabupaten Manggarai Barat Nomor 64 dan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Sistem Kepariwisata Daerah. Sementara untuk indikator dimensi kelembagaan, ada dua kelembagaan pariwisata yaitu Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan Badan Otoritas Pariwisata (BOP) Labuan Bajo Flores. Lebih lanjut untuk indikator infrastruktur jaringan TIK yang digunakan adalah dengan pemasangan kabel-kabel fayber Optik (kabel FO) di semua OPD khususnya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan Badan Otoritas Pariwisata (BOP) Kabupaten Manggarai Barat, serta masih adanya daerah yang *blank spot*. Kemudian, dari dimensi aplikasinya menggunakan sosial media seperti Facebook, Instagram dan Youtube. Sementara untuk dimensi perencanaannya, belum ada kebijakan terkait perencanaan SDM baik secara kualitas maupun kuantitasnya, keterbatasan anggaran dan infrastruktur pendukung lainnya.

Kata kunci : *Electronic government*, Promosi Pariwisata, Pelayanan Publik.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT. Syukur alhamdulillah atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan dan penulisan skripsi dengan judul : “*Penerapan Electronic Government Sebagai Media Promosi Pariwisata Berbasis Online di Kabupaten Manggarai Barat*”.

Sholawat teriring salam semoga tetap tercurahkan kepada manusia paripurna Nabi Muhammad SAW, dengan bersama-sama kita lafalkan “*Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad*”.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ilmu Pemerintahan (S.IP) pada program studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penghargaan dan terima kasih yang setulus-tulusnya penulis sampaikan kepada Ayahanda tercinta Sadar Ahyar (almarhum) dan Ibunda ku tersayang Siti Hawa yang selama ini telah menjadi *single parent* untuk membesarkan, mendidik dan membimbing kami anak-anakmu dengan penuh rasa sabar dan ikhlas tanpa kenal lelah. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan nikmat sehat, panjang umur dan keberkahan di dunia dan akhirat atas budi baik yang telah dan selalu Mama berikan kepada kami anak-anakmu, aamiin ya Allah.

Penghargaan dan terima kasih pula penulis sampaikan kepada Bapak Rudi Hardi, S.Sos., M.Si selaku Pembimbing I dan Ibu Nur Khaerah, S.IP., M.Si

selaku Pembimbing II yang telah banyak membantu penulis dalam menyusun skripsi ini. Dan pada kesempatan ini juga, penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik S.Sos, M.Si Selaku Dekan dan seluruh jajaran Wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Dr. Nuryanti Mustari, S.IP, M.Si selaku Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Kepada Dosen dan Staf Pegawai Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar
4. Kepada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan Dinas Informasi dan Komunikasi Kabupaten Manggarai Barat yang telah memberikan izin melakukan penelitian kepada penulis serta memberikan informasi dan data-data terkait penelitian.
5. Sahabat-sahabatku (Moh. Nur, Abd. Rahman, Aryati Aqila, Sandi Nayoan, Andi Tatan, Restu, Sigit) dan rekan-rekan seperjuangan sejurusan Ilmu Pemerintahan Angkatan 014.
6. Dan semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak sempat disebutkan satu persatu.

Akhir kata, penulis sangat menyadari bahwa dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, pada kesempatan ini pula penulis memohon saran dan kritik dari semua pihak yang

sifatnya membangun demi kesempurnaannya. Semoga segala bantuan, dukungan dan bimbingan yang telah diberikan kepada penulis bernilai ibadah di sisi Allah SWT. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua dan menjadi bahan masukan dan rujukan bagi dunia pendidikan khususnya bagi peneliti yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut terkait masalah penerapan elektronik *government* sebagai media promosi pariwisata berbasis online.

Makassar, 22 Maret 2021

Penulis,

YONO

NIM.105640203314



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b>	
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	ii
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH</b> .....	iii
<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Kegunaan Penelitian .....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Penelitian Terdahulu .....	8
B. Tinjauan Konsep dan Teori .....	10
1) Konsep dan Teori Elektronik Government .....	10
2) Konsep dan Teori Promosi Wisata .....	17
C. Kerangka Pikir .....	20
D. Fokus Penelitian .....	22
E. Deskripsi Fokus Penelitian .....	23
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	26
A. Waktu dan Lokasi Penelitian .....	26
B. Jenis dan Tipe Penelitian .....	26
C. Sumber Data .....	27
D. Informan Penelitian .....	27
E. Teknik Pengumpulan Data .....	28
F. Teknik Analisa Data .....	29

G. Pengabsahan Data.....	30
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>32</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	31
1. Keadaan Geografis dan Batas Wilayah Kabupaten Manggarai Barat.....	32
2. Topografi Kabupaten Manggarai Barat.....	33
3. Demografi Kabupaten Manggarai Barat .....	33
4. Visi Misi kabupaten Manggarai Barat .....	34
5. Struktural Keorganisasian .....	35
6. Profil Pariwisata Labuan Bajo .....	36
B. Hasil dan Pembahasan .....	40
1. Dimensi Kebijakan.....	40
2. Dimensi Kelembagaan.....	49
3. Dimensi Infrastruktur.....	55
4. Dimensi Aplikasi.....	62
5. Dimensi Perencanaan.....	68
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>76</b>
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran.....	77
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>79</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dewasa ini diyakini dapat meningkatkan kinerja pemerintah dan memungkinkan berbagai kegiatan dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Kementerian Komunikasi dan Informatika Indonesia memiliki tugas, fungsi dan wewenang merumuskan kebijakan mengenai Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan telah melakukan evaluasi bagi penentuan standar baku dalam pemeringkatan penerapan *electronic government* yang tertuang dalam pemeringkatan *electronic government* Indonesia. *Electronic government* biasa disingkat dengan istilah *e-government* (Napitupulu, 2017)

Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 adalah pedoman dalam merumuskan kebijakan demi terlaksananya manajemen atau penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas, efektif, efisien, bersifat terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Aturan atau pedoman tersebut merupakan acuan umum bagi instansi atau lembaga pemerintahan dalam penyelenggaraan pelayanan publik berbasis elektronik. Perihal rencana induk SPBE yang terpadu dan berkesinambungan berdasarkan *grand design* dengan rencana pembangunan secara berkelanjutan di level pusat maupun daerah melalui koordinasi Kementerian terkait.

Oleh karena itu, rencana induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tersebut setiap lima tahun sekali atau dalam waktu yang

tidak ditentukan akan dikaji kembali setelah melakukan koreksi dan perbaikan berdasarkan hasil pantauan terhadap implementasi SPBE dengan cara merombak aturan-aturan yang telah direalisasikan.

Berdasarkan pada pedoman tersebut maka kebutuhan akan ketersediaan informasi yang efektif dan efisien menjadi syarat mutlak guna terselenggaranya pelayanan publik yang prima oleh lembaga negara/pemerintah kepada masyarakat, dunia usaha dan kelompok kepentingan lainnya melalui penerapan *e-government* yang dapat diakses kapan dan dimanapun.

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa telah terjadi pergeseran cara pandang masyarakat diberbagai level secara signifikan. Pergeseran cara pandang masyarakat tersebut ternyata dipengaruhi oleh kemajuan ilmu pengetahuan yang dikenal dengan sebutan elektronik *government* terhadap pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) oleh otoritas publik dalam hal ini adalah pemerintah sebagai pemberi layanan publik. Implikasi dari kemajuan ilmu pengetahuan di bidang teknologi informasi dan komunikasi mengisyaratkan kepada penyelenggara layanan publik untuk segera melakukan perubahan besar dengan mengadopsi konsep elektronik *government* dalam memberikan layanan kepada masyarakat karena diyakini lebih maksimal terhadap tingkat kepuasan masyarakat.

Labuan Bajo merupakan Ibu Kota dari Kabupaten Manggarai Barat yang termasuk dalam salah satu Kabupaten yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kabupaten Manggarai Barat telah ditetapkan sebagai salah satu destinasi wisata nasional dalam *asterplan* Kementerian Pariwisata dan

Ekonomi Kreatif pada tahun 2012. Penetapan Kabupaten Manggarai Barat sebagai masterplan pengembangn pariwisata nasional berdampak positif berdasarkan jumlah kunjungan wisatawan sangat signifikan selama beberapa tahun terakhir ke beberapa objek destinasi yang ada. Dalam hal melakukan pengembangan di sektor usaha priwisata, pemerintah Kabupaten Mangarai Barat sudah selayaknya membutuhkan terobosan baru yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan.

Salah satu cara atau metode yang dapat digunakan adalah dengan mengadopsi konsep *e-government* melalui pemanfaatan *website* daerah dan pemanfaatan media sosial berbasis online yang khusus menawarkan potensi-potensi daerah yang ada. Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat dalam hal ini adalah Dinas Komunikasi dan Informasi selaku pelaksana teknis promosi pariwisata berbasis online dengan segala macam bentuk sistem penyelenggaraan pemerintah yang mengedepankan kemudahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sudah semestinya menerapkan konsep elektronik *government*.

Namun dalam penerapannya masih banyak kendala yang dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Manggarai Barat antara lain adalah minimnya infrastruktur jaringan komunikasi, kualitas sumber daya aparatur pemerintah yang kurang kompeten dalam mengoperasikan komputer dan sistem jaringan internet, keterbatasan alokasi dana dalam pengembangan elektronik *government* hampir disemua instansi atau lembaga pemerintah daerah. Hal tersebut tentu berdampak pada aktivitas pelayanan promosi pariwisata yang

kurang memuaskan yang dirasakan oleh masyarakat Manggarai Barat maupun wisatawan mancanegara. Masalah-masalah lainya yang telah ditemukan adalah tidak adanya data-data akurat dan jelas terkait daerah-daerah tujuan wisata yang ditampilkan. Sistem informasi destinasi-destinasi wisata yang ditampilkan di website tersebut hanya sebatas menampilkan gambar atau foto saja tanpa adanya informasi atau keterangan yang lengkap.

Penerapan konsep elektronik *government* hanya sampai pada tahap *publis* tanpa adanya informasi yang lebih akurat dan detail yang dapat diakses oleh masyarakat. Interaksi interaktif yang menjadi inti dalam proses penerapan *e-government* menjadi tidak dapat terpenuhi lantaran kualitas sumber daya manusia aparatur pemerintah yang kurang mumpuni dalam bidang pemanfaatan teknologi komunikasi dalam memberikan pelayanan.

Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat baru menerapkan konsep *e-government* pada tahun 2017 yang lalu yang memiliki domain [www.manggaraibaratkab.go.id](http://www.manggaraibaratkab.go.id) sehingga masalah-masalah yang telah disebutkan di atas berdampak pada efektivitas pelayanan publik dalam bidang pariwisata di Kabupaten Manggarai Barat, Labuan Bajo NTT. Sesuai dengan tugas dan fungsinya, sudah semestinya pemerintah daerah Manggarai Barat membuka dan menyediakan berbagai saluran aspirasi dan informasi untuk kemudahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Salah satu saluran yang dapat atau dianggap paling mudah diakses oleh masyarakat adalah media atau saluran berbasis online melalui internet. Keberadaan *website* dan media berbasis online oleh pemerintah daerah

Manggarai Barat merupakan suatu kemajuan dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi kegiatan promosi pariwisata yang ada di Kabupaten Manggarai Barat.

Dengan melihat potensi-potensi wisata yang ada, sebut saja komodo, Pulau Rinca, Goa Batu Cermin, Pulau Padar, *pink beach* dan masih banyak lainnya, sudah seharusnya dipromosikan menggunakan konsep *e-government* melalui penggunaan atau pemanfaatan *website* pariwisata dan media media online lainnya. Dinas Komunikasi dan Informasi bersama Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai Barat harus segera membenah diri, terutama pembangunan infrastruktur jaringan informasi dan komunikasi dan juga pemberdayaan dan atau pelatihan sumber daya manusia aparatur pemerintah daerah harus menjadi prioritas utama.

Kemudahan dalam mengakses tempat-tempat wisata dengan pengaplikasian konsep elektronik *government* akan memberikan keuntungan yang sangat besar bagi pemasukan atau pendapatan daerah Kabupaten Manggarai Barat. Maka dari itu, riset ini mengambil konsen terhadap penerapan elektronik *government* dalam promosi pariwisata yang ada di Kabupaten Manggarai Barat. Penggunaan *website* serta sosial media dalam promosi pariwisata berpusat pada server yang dapat dijangkau tanpa batasan waktu dan dimanapun wisatawan maupun calon wisatawan berada. Bertatap muka secara langsung tidak lagi diperlukan, layanan informasi wisata kepada wisatawan menjadi lebih efektif, efisien, transparan dan akuntabel karena dampak dari pengaplikasian konsep elektronik *government*.

Mengacu pada bahasan-bahasan masalah dan fenomena pada latar belakang di atas maka riset ini berjudul : **“Penerapan *Electronic Government* Sebagai Media Promosi Pariwisata Berbasis Online di Kabupaten Manggarai Barat”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Paparan latar belakang di atas menjadi acuan peneliti dalam merumuskan masalah penelitian, seperti di bawah ini : **“Bagaimana Penerapan Elektronik *government* Sebagai Media Promosi Pariwisata Berbasis Online di Kabupaten Manggarai Barat”** ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini didasarkan pada rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya. Hal yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : **“Untuk mengetahui Penerapan Elektronik *government* Sebagai Media Promosi Pariwisata Berbasis Online di Kabupaten Manggarai Barat”**.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Setelah tujuan penelitian di atas dapat terpenuhi, maka secara otomatis akan mampu memberikan beberapa dampak positif bagi keberlangsungan penerapan elektronik *government* secara menyeluruh terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Hal yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil riset ini diharapkan bermanfaat bagi peneliti-peneliti lain yang ingin melakukan penelitian yang lebih komprehensif terkait pemanfaatann

*e-government* khususnya ilmu pengetahuan yang berkenaan dengan pemanfaatan teknologi informatika dan komunikasi.

## 2. Manfaat Praktis

Asas manfaat dan kegunaan dari hasil riset ini, semoga dapat menjadi salah satu referensi baru dalam menerapkan konsep *e-government* khususnya bagi pemerintah Kabupaten Manggarai Barat dalam penyelenggaraan pelayanan publik terutama dalam bidang pariwisata terkait penggunaan teknologi komunikasi.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Mencari rujukan pembandingan guna menemukan persamaan dan perbedaan dari penelitian sebelumnya adalah salah satu cara yang harus dilakukan agar peneliti mendapatkan hasil yang relevan dengan kemajuan sektor pariwisata.

No.	Nama dan Tahun	Hasil Penelitian
1	Ayutiani & Satria Putri, (2018)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terjadi penyesuaian reaksi secara psikologis, dimana pengikut mendapatkan data dan keuntungan dari akun @kerbandung. Selain mendapatkan data dan keuntungan, followers juga mengalami reaksi yang penuh perasaan, khususnya penyesuaian perasaan atau emosi setelah melihat postingan akun @Kulinerbandung, setelah mengalami reaksi emosional, muncul reaksi sosial berupa mengshare kembali postingan-postingannya ke beranda instagramnya agar dapat dilihat oleh pengguna instagram lainnya.
2	(Janga, 2017)	Pemanfaatan kerangka data destinasi pariwisata berbasis online untuk promosi pariwisata yang ada di Kabupaten Sumba Tengah Nusa Tenggara Timur memberikan dampak positif terhadap transformasi informasi wisata yang dapat diakses secara luas oleh calon wisatawan dan berbanding terbalik dengan promosi pariwisata yang dilakukan secara konvensional. Data dan informasi objek wisata yang ada selalu terupdate karena berbasis online yang dapat menjangkau segenap masyarakat lokal dan bahkan sampai pada level dunia global.

3	(Ekadewi et al., 2018)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan website pariwisata Kabupaten Bangka Selatan yang telah dihubungkan dengan halaman facebook dan twitter memberikan kemudahan dalam mengakses informasi destinasi wisata yang ada. Kemudahan informasi destinasi wisata yang didapat menjadikan calon-calon pengunjung merasa tertarik untuk berwisata ke sejumlah objek wisata yang ada di Kabupaten Bangka Selatan.
---	------------------------	---

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ayutiani dan Satrian menggunakan media sosial Instagram untuk melakukan promosi wisata kuliner yang ada di Kota Bandung. Berdasarkan penelitiannya dapat diketahui bahwa penggunaan akun Instgram sebagai media promosi wisata kuliner tersebut mendapatkan respon yang cukup banyak dari para followersnya. Postingan tersebut kemudian di share kembali melalui akun instgram dari beberapa followersnya ke berandanya. Sementara itu, adapun persamaan dari penelitian ini dengan penelitian terdahulu adanya sama-sama menggunakan media sosial untuk mempromosikan pariwisata yang ada. Pada penelitian terdahulu hanya penggunaan instgram sebagai media promosi pariwisata. Sedangkan pada penelitian yang sekarang menggunakan beberapa media sosial sebagai saluran informasi pariwisata seperti facebook, You tube dan instgram.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Janga, 2017 menggunakan pendekatan website yang selalu terupdate terkait sumber dan informasi pariwisata yang ada di Kabupaten Sumba Tengah Nusa Tenggara Timur. Sementara pada penelitian yang sekarang sama menggunakan media berbasis online. Namun terdapat perbedaan dari media promosi yang digunakan. Pada penelitian

yang dilaksanakan oleh Janga, 2017 menggunakan website yang selalu terupdate untuk informasi pariwisatanya. Sedangkan pada penelitian yang sekarang menggunakan media sosial seperti Facebook, Instagram dan You Tube sebagai media promosi pariwisata yang digunakan oleh pemerintah Kabupaten Manggarai Barat dalam hal ini adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

3. Pada penelitian terdahulu berikutnya yang dilakukan oleh (Ekadewi et al., 2018) juga menggunakan website yang sudah terkoneksi dengan halaman Facebook dan Twitter untuk promosi pariwisata. Sementara pada penelitian yang sekarang ini hanya menggunakan media sosial seperti Facebook, Instagram dan You Tube dalam mempromosikan pariwisata yang ada di Kabupaten Manggarai Barat. Namun pada dasarnya kedua penelitian ini sama-sama menggunakan media berbasis online sebagai saluran informasi pariwisatanya.

## **B. Tinjauan Konsep dan Teori**

### **1. Konsep dan Teori Elektronik Government**

Elektronik *government* dapat didefinisikan sebagai seluruh rangkaian kegiatan dan tindakan pemerintah baik pusat maupun daerah dalam proses penyelenggaraan kebijakan publik yang melibatkan partisipasi masyarakat baik itu langsung maupun tidak langsung dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi sebagai bentuk pengoptimalisasi proses penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien dan transparan terhadap upaya mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*) secara keseluruhan di

tingkat nasional. Amrih Rahayuningtyas & Setyaningrum, (2018). lebih lanjut dijelaskan bahwa ada tiga faktor mengapa elektronik *government* penting untuk diterapkan yaitu sebagai berikut :

- a) Keikutsertaan penerima kebijakan publik dalam bentuk hubungan timbal balik antar otoritas publik dan masyarakat adalah sebuah inovasi terbaru bagi penyelenggaraan pemerintahan secara elektronik.
- b) Interaksi secara elektronik adalah kemudahan terhadap layanan birokrasi yang cenderung konvensional, tidak efektif dan efisien.
- c) Elektronik *government* dapat menawarkan juga informasi di tingkat lokal

Sementara itu, James S.L. Yong dalam Sriyati et al., (2017) mengatakan bahwa : *“Electronic government as the government’s use of technology, in particular, web-based Internet applications to enhance access and delivery of government services to citizens, business partners, employees and other government entities”*. Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa pemerintah sebagai penyelenggara layanan publik diusahakan agar dapat memanfaatkan teknologi berbasis aplikasi internet berupa website dalam rangka peningkatan akses layanan publik pada masyarakat, sektor bisnis dan lembaga atau instansi pemerintahan lainnya. Penerapan elektronik *government* adalah usaha dalam rangka pengembangan penyelenggaraan pemerintah melalui media elektronik agar terwujudnya pelayanan kepada masyarakat yang berkualitas, transparan, efektif, efisien dan akuntabel.

Optimalisasi penggunaan teknologi informasi dan komunikasi adalah proses yang harus dilakukan agar manajemen sistem kerja pemerintahan di masing-masing instansi atau lembaga dapat dikembangkan melalui konsep elektronik *government*. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dapat dibagi menjadi dua (2) yang saling berhubungan yakni sebagai berikut :

- a) Olah data dan informasi, serta manajemen sistem kerja melalui media elektronik
- b) Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi harus dimanfaatkan sebagai upaya peningkatan kualitas layanan yang bisa diperoleh dengan mudah oleh masyarakat tanpa batasan waktu dan tempat.

Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang oleh pemerintah sebagai bagian dari proses mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan transparan tersebut terdapat beberapa manfaat dari penerapan *e-government*, antara lain seperti yang dikatakan oleh Satriya dalam Jalma et al., (2019) berikut ini :

- a) Meringankan biaya administrasi
- b) Efektivitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat dapat diberikan seiring meningkatnya kemampuan responsivitas pemberi layanan.
- c) Penyediaan akses layanan kepada seluruh lembaga dan departemen atau Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) diseluruh level
- d) Dukungan penguatan terhadap ekonomi di tingkat daerah dan pusat
- e) Menjadi media penyaluran aspirasi secara bebas tanpa tekanan

Dari seluruh rangkaian kegiatan atau tindakan pemerintah seperti yang telah dipaparkan di atas, tentu sangatlah tidak mudah dalam pengaplikasiannya. Oleh karena itu, Kementerian Informasi dan Komunikasi di semua level baik daerah maupun pusat melakukan evaluasi terhadap implementasi elektronik *government* secara nasional. Evaluasi implementasi elektronik *government* bertujuan untuk mencapai standar penerapan teknologi informasi dan komunikasi diberbagai lembaga pemerintahan demi terwujudnya birokrasi yang ramping berskala nasional. Evaluasi implementasi elektronik *government* dikenal dengan sebutan *pemeringkatan elektronik government* Indonesia yang kemudian dinilai dari sisi kebijakan, kelembagaan, infrastruktur, aplikasi dan perencanaannya Amrih Rahayuningtyas & Setyaningrum, (2018).

Menurut Boone Thomson dalam Ekadewi & Prasetyo Wibowo Yunanto, (2018) *website* merupakan kumpulan-kumpulan sumber informasi kaya grafis yang berkaitan satu dengan lainnya dalam internet yang sangat luas. Lebih lanjut dapat dikatakan bahwa *website* dapat memberikan informasi dalam bentuk gambar, suara, tulisan, dan vidio yang terintegrasi dengan menggunakan mesin pencarian melalui koneksi internet.

Lebih lanjut, Rizaniar and Sardiarinto dalam Utarki et al., (2020) menjelaskan bahwa *website* dapat dikelompokkan dalam tiga (3) macam, yakni sebagai berikut ini :

- a) Halaman *website* yang tampilannya bersifat tetap dikenal dengan sebutan *Website Statis*. Namun halamannya dapat diedit secara

manual di halaman web yang ingin dirubah tampilannya secara langsung melalui kode programnya.

- b) Tampilan halaman dapat diubah secara langsung di webnya dengan kode programnya tidak harus diedit terlebih dahulu, dinamai dengan website dinamis.
- c) Adanya hubungan timbal balik antara sesama pengguna adalah ciri dari website interaktif.

Indrajit dalam Hutagalung et al., (2019) menjelaskan bahwa minimal ada tiga (3) hal yang harus dimiliki oleh pemerintah sehubungan dengan penerapan website sebagai media promosi, yaitu:

- a) Daya dukung penggunaan website tergantung terhadap tersedianya sumber daya manusia yang berkompeten dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi
- b) Suksesnya penggunaan website sangat bergantung pada pengadaan infrastruktur jaringan teknologi informasi dan komunikasi sebagai daya dukung utama
- c) Anggaran yang memadai akan berdampak pada efektivitas website yang ada

Melalui website, tiap-tiap pengakses internet dapat mencari dan menemukan informasi-informasi di situs *web* yang bukan cuma berupa tulisan-tulisan, tapi juga terdapat gambar, suara, film, animasi serta lainnya. Selain itu *website* mempunyai fungsi yang bermacam-macam, tergantung dari tujuan dan jenis website yang dibangun. *Website* sebagai media informasi yang harus

didukung dengan ketersediaan anggaran yang memadai, infrastruktur jaringan informasi dan komunikasi yang juga memadai serta adanya sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi.

Ismayanti dalam Bessie, (2019) mendefinisikan teknologi informasi komunikasi sebagai peralatan digital dalam proses dan fungsi bisnis. Lebih lengkap dikatakan bahwa teknologi informasi komunikasi merupakan suatu alat yang dipakai untuk mendapatkan, mentransfer dan menyalurkan data dan informasi sebagai bentuk komunikasi otoritas publik kepada masyarakat dan dunia usaha. Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa TIK adalah media atau peralatan digital yang digunakan sebagai alat bantu dalam proses pentransferan data maupun sebagai alat berkomunikasi baik satu maupun dua arah.

Mengutip pendapat Aji Supriyanto dalam Kalbuadi et al., (2018) menjelaskan bahwa situs atau *website* yang berkualitas harus memiliki hal-hal seperti dibawah ini :

- a) Adanya menu penelusuran adalah sesuatu yang harus diperhatikan dan menjadi prioritas agar *website* tersebut dapat diakses dari segi kemudahannya dan kecepatannya.
- b) Sebuah *website* diusahakan menarik dari sisi tampilannya. Tersedianya informasi-informasi hangat dalam *website* tersebut akan mempengaruhi pemakai bertahan lebih lama menelusuri sebuah *website*. Adanya bahasa penelusuran yang mudah dimengerti sebagai

bentuk kepuasan pemakai agar menghasilkan sebuah penilaian yang bagus terhadap website tersebut.

- c) Website yang bagus harus mampu menyesuaikan dengan tren kekinian agar mampu bersaing. Kejelasan dari sebuah website dapat dilihat dari apa yang ingin dicapai berdasarkan asas manfaatnya.
- d) Website yang bagus diupayakan mampu menyuguhkan data dan informasi-informasi terbaru disesuaikan dengan kebutuhan pemakai. Hal ini dapat tercapai dengan membuat tampilan laman website yang mampu dijangkau pemakai kapan dan dimanapun.
- e) Website yang bagus juga harus memperhatikan dan memprioritaskan data privasi pemakai agar terjaga terhadap penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat digaris bawahi bahwa website untuk promosi destinasi wisata mesti mempunyai rancangan informasi-informasi terbaru seperti akses penelusuran, foto-foto dan dari sisi privasi data pemakai dimana dan kapanpun pemakai website berada. Dalam kaitannya dengan penerapan *e-government*, menurut Indrajit dalam Rizky et al., (2019) ada lima faktor yang menjadi aspek penting yang harus benar-benar diperhatikan dan dipertimbangkan dalam membangun sebuah website di antaranya yaitu: 1) *Audience*, 2) *Konten*, 3) *Interactivity*, 4) *Usability* dan 5) *Innovation*.

## 2. Konsep dan Teori Promosi Wisata

Terma industri perjalanan berakar dari dua akar kata yakni pari dan industri perjalanan. Pari menyiratkan banyak atau berulang-ulang kali, umumnya dan sekitar. Industri perjalanan menyiratkan perjalanan atau menyusuri. Maka industri perjalanan adalah tamasya yang diselesaikan secara umum atau berkeliling mulai dari satu tempat lalu ke tempat berikutnya. Industri perjalanan mempunyai makna yang umum, dan tidak hanya perjalanan, tetapi juga dikenal dengan barang dan tempat liburan yang dikunjungi, alat kendaraan yang dipakai, layanan, kenyamanan, restoran, hiburan, kerjasama sosial antara wisatawan dan penghuni terdekat.

Menurut A.J Burkart dan S. Medlik, dalam Elisabet Yunaeti Anggaeni, Oktafianto, (2018) Industri perjalanan atau dikenal dengan sebutan “pariwisata” dimaknai sebagai bepergiannya seseorang individu untuk jangka waktu yang singkat terhadap keberadaan di luar tempat mereka biasanya tinggal dan bekerja yang berkaitan dengan aktivitas-aktivitas selama kunjungan mereka di objek-objek yang dikunjungi.

Senada dengan hal diatas, Oka A Yoeti dalam bukunya sebagaimana yang dikutip oleh Siradjuddin, (2018) mengatakan bahwa pariwisata adalah sebuah kegiatan seseorang individu dalam keadaan sadar yang memperoleh manfaat layanan dengan bergiliran di antara individu-individu di dalam suatu daerah itu sendiri atau di luar negeri, termasuk kediaman individu-individu dari wilayah yang berbeda untuk beberapa saat dalam mencari kebahagiaan yang

bervariasi dari apa yang mereka alami, di mana dia menemukan pekerjaan yang pasti.

Berdasarkan definisi dan terma “pariwisata” yang telah diuraikan sebelumnya, maka bisa digarisbawahi bahwa aktivitas industri perjalanan mempunyai sifat-sifat sebagaimana di bawah ini :

- a) Ada lebih dari satu tempat atau objek wisata yang berhubungan satu sama lainnya, yakni tempat asal dan tempat yang ingin dikunjungi.
- b) Tempat tujuan harus mempunyai objek yang menarik bagi calon wisatawan dan wisatawan
- c) Tempat tujuan objek wisata harus terdapat perlengkapan infrastruktur penunjang industri perjalanan
- d) Waktu tempuh yang singkat ke tempat tujuan wisata
- e) Aktivitas industri perjalanan harus berimplikasi kepada interaksi kebudayaan, pendapatan dan alam atau daerah sekitar

Guna mendukung terselenggaranya aktivitas pariwisata yang mengedepankan asas kepuasan bagi para wisatawan maka Buhalis dalam Novianti & Wulung, (2020) menjelaskan bahwa destinasi pariwisata haeus dibangun berdasarkan enam (6) variabel utama yang mencakup hal berikut ini :

- a) atraksi atau daya tarik wisata (alam, buatan, dan budaya);
- b) aksesibilitas (sistem transportasi yang terdiri dari rute, terminal dan moda transportasi);
- c) aminitas mencakup akomodasi dan fasilitas pariwisata yang diperuntukan bagi wisatawan;

- d) ketersediaan paket wisata (paket yang diatur sebelumnya oleh pengelola destinasi pariwisata)
- e) aktivitas merupakan semua kegiatan tersedia di tujuan dan apa yang akan dilakukan wisatawan selama kunjungan; dan
- f) layanan tambahan, layanan yang digunakan oleh wisatawan (seperti bank, telekomunikasi, pos, agen koran, rumah sakit, dll.)

Media promosi dalam pariwisata adalah arus informasi satu arah yang dibuat untuk mengarahkan calon wisatawan atau lembaga usaha pariwisata kepada tindakan yang mampu menciptakan pertukaran (jual beli) dalam pemasaran produk pariwisata. Tujuan promosi adalah menginformasikan, mempengaruhi, dan/atau mengingatkan. Usaha promosi haruslah menarik bagi wisatawan. Kegiatan promosi idealnya dilakukan secara berkesinambungan melalui beberapa media yang dianggap efektif dapat menjangkau pasar, baik cetak maupun elektronik. Mill, Robert Christie dalam Ekadewi & Prasetyo Wibowo Yunanto, (2018).

Sementara itu, berbicara tentang kegiatan promosi atau pemasaran pariwisata terdapat dua aspek utama dalam komunikasi pemasaran pariwisata, yakni: periklanan dan promosi. Secara garis besar, strategi komunikasi pemasaran pariwisata dilakukan dalam lingkup teknis dan operasional yang merujuk pada beberapa hal, yakni: 1) promosi internet; 2) promosi melalui event atau kegiatan; dan 3) penjualan melalui ticketing. Prastiani & Pratiwi, (2020).

Pentingnya kegiatan pemasaran atau promosi pariwisata yang terimplementasi melalui komunikasi pemasaran hendaknya menjadi salah satu alternatif yang dapat digunakan untuk menjadikan sebuah objek wisata menjadi lebih menarik banyak perhatian wisatawan. Tujuan komunikasi pemasaran pariwisata dapat diidentifikasi menjadi tiga hal, yaitu:

- a) Menyebarkan informasi pariwisata
- b) Mempengaruhi seseorang untuk membeli atau beralih merek;
- c) Mengingatkan seseorang untuk melakukan pembelian ulang.

Ketiga pernyataan di atas dapat merujuk pada bagaimana komunikasi pemasaran mengacu pada tiga aspek utama komunikasi, yakni informatif, persuasif, dan *reminder* Suryanto dalam (Prastiani & Pratiwi, (2020). Proses komunikasi pemasaran terhadap kegiatan promosi pariwisata memuat sebuah model yang berawal dari pemasaran bersifat linear, yakni inisiatif pertama pada interaksi yang dilakukan oleh pemilik brand atau perusahaan penyedia jasa pariwisata. Kegiatan promosi pariwisata tersebut mengindikasikan interaksi yang diterima oleh target pasar dan direspon sebagai bentuk umpan balik (Yunus, 2019). Konsep inilah yang secara tidak langsung mendasari bagaimana komunikasi pemasaran dan kegiatan promosi pariwisata menjadi penting untuk dilakukan pada sejumlah sebuah objek wisata.

### **C. Kerangka Pikir**

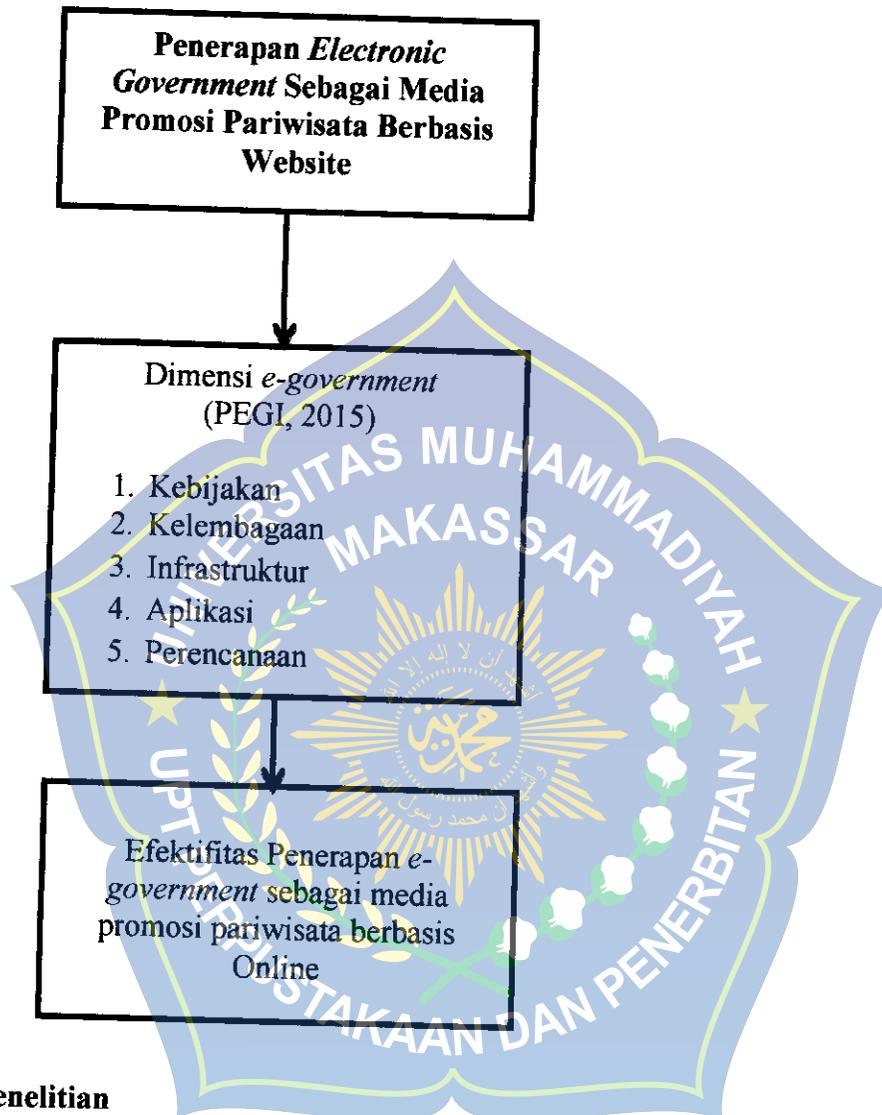
Promosi dan pemasaran pariwisata merupakan elemen utama terhadap keberlangsungan industri perjalanan. Tugas utama yang harus dimainkan oleh otoritas publik adalah menyediakan sarana dan prasarana pendukung industri

perjalanan. Hal tersebut dilakukan agar rencana pengembangan industri wisata dapat disebarluaskan melalui berbagai media promosi terkait daya tarik wisata yang ada.

Berhubungan dengan hal tersebut di atas, maka sudah selayaknya Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat secara khusus Kota Labuan Bajo sebagai daerah tujuan pariwisata mengadopsi konsep *E-government* dengan memanfaatkan website yang ada untuk melakukan promosi pariwisata, mengingat Kabupaten Manggarai Barat sudah ditetapkan sebagai salah satu daerah dengan predikat Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) untuk menarik minat para wisatawan baik lokal, nusantara maupun mancanegara berkunjung ke Kabupaten Manggarai Barat Labuan Bajo melalui penciptaan 'brand image' yang kuat.

Oleh karena itu, pengiklanan industri perjalanan sedemikian hingga disebarluaskan dengan menggunakan media sosial dan website menjadi hal yang terpenting untuk dilakukan. Berikut ini adalah bagan kerangka pikir yang digunakan peneliti guna mendapatkan hasil penelitian yang relevan sesuai dengan apa yang menjadi fokus penelitian seperti berikut ini :

**Bagan : 1 Kerang Pikir**



#### **D. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian yang dimaksud adalah upaya untuk membatasi ruang lingkup pembahasan masalah-masalah yang telah dipaparkan di latar belakang masalah. Hal ini dilakukan peneliti agar dalam proses penyusunannya tidak melebar dari topik pembahasan sehingga didapat hasil yang relevan. Berikut ini adalah beberapa hal yang menjadi fokus penelitian ini : “Penerapan elektronik *government* sebagai saluran promosi wisata berbasis online”

## E. Deskripsi Fokus Penelitian

Adalah penjelasan singkat terhadap objek penelitian yang akan diteliti sesuai dengan fokus penelitian.

### 1) Dimensi Kebijakan

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan “Dimensi Kebijakan” adalah berbicara tentang perumusan dan pelaksanaan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Manggarai Barat terkait penerapan *E-Government* dalam penyelenggaraannya melakukan promosi pariwisata yang ada dengan menggunakan website dan media sosial berbasis online.

### 2) Dimensi Kelembagaan

Berbicara tentang “Dimensi Kelembagaan” dalam penelitian ini berkaitan dengan tugas dan fungsi (Tupoksi) bidang organisasi yang mempunyai wewenang serta bertanggungjawab dalam pengembangan dan pelaksanaan pariwisata melalui penerapan *e-government*. Kelembagaan pariwisata yang memiliki tupoksi dalam promosi pariwisata yang ada di Kabupaten Manggarai Barat adalah Dinas Pariwisata dan Badan Otoritas Pariwisata (BOP) Labuan Bajo Flores

### 3) Dimensi Infrastruktur

Dari segi infrastruktur dapat dijelaskan bahwa terkait dengan masalah ketersediaan jaringan komunikasi (LAN, WAN dan Internet), dan keberadaan data center juga tower telekomunikasi.

#### 4) Dimensi Aplikasi

Dalam penelitian ini menggunakan aplikasi dari media sosial seperti penggunaan Facebook, Instagram dan You Tube sebagai media promosi pariwisata yang ada di Kabupaten Manggarai Barat

#### 5) Dimensi Perencanaan

Dalam penelitian ini khusus membahas tentang tata kelola dan manajemen perencanaan TIK secara terpadu dan berkelanjutan dalam kaitannya mendukung promosi pariwisata berbasis online di Kabupaten Manggarai Barat

6) *E-government* secara umum dipahami sebagai upaya penggunaan alat teknologi informasi atau dikenal dengan TIK oleh pemerintah dalam memberikan pelayanan publik, baik itu pelayanan kepada masyarakat, dunia usaha dan kepada sesama aparatur pemerintah lainnya dalam bentuk informasi yang bersifat efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Dalam penelitian ini menggunakan media sosial seperti Facebook, Instagram dan You tube untuk promosi pariwisata berbasis online di Kabupaten Manggarai Barat

7) Pariwisata dalam pengertian umum adalah perjalanan yang dilakukan oleh seseorang maupun kelompok menuju ke suatu tempat yang mempunyai daya tarik tertentu yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana daerah tujuan perjalanan yang bersifat sementara.

- 8) Promosi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang maupun kelompok atau lembaga tertentu dalam melakukan penawaran barang atau jasa melalui berbagai saluran.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu pelaksanaan riset direncanakan setelah dilakukannya seminar proposal dengan kurun waktu dua bulan bahkan lebih tergantung keadaan di lapangan. Riset ini dilaksanakan di Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur lebih khususnya adalah di kantor Dinas Komunikasi dan Informasi dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan kabupaten Manggarai Barat. Dan dalam konteks ini, yang menjadi fokus penelitiannya adalah bagaimana peneliti mendeskripsikan penerapan *e-government* sebagai media promosi pariwisata di kabupaten Manggarai Barat.

#### B. Jenis dan Tipe Penelitian

##### 1) Jenis Penelitian

Pendekatan kualitatif digunakan dalam riset ini. Riset yang akan dilaksanakan bertujuan untuk menjawab persoalan terkait implementasi elektronik *government* sebagai media promosi pariwisata berbasis online, khususnya di Dinas Komunikasi dan Informasi dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan kabupaten Manggarai Barat.

##### 2) Tipe Penelitian

Sementara itu, terkait dengan tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yakni peneliti mencoba mendeskripsikan permasalahan-permasalahan, fenomena-fenomena yang menjadi fokus

penelitian dalam penerapan *e-government* sebagai media promosi pariwisata di Kabupaten Manggarai Barat.

### C. Sumber Data

- 1) Data Primer, merupakan sumber utama dalam riset ini dan akan dikumpulkan melalui beberapa cara pengumpulan data seperti wawancara, pengamatan lapangan, dan dokumentasi. Sumber data yang kredibel dalam memberikan informasi dan data terkait permasalahan yang menjadi fokus penelitian ini akan dilaksanakan di Dinas Komunikasi dan Informasi dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan serta di lembaga atau instansi lainnya yang dianggap relevan dalam memberikan data dan informasi yang dibutuhkan di kabupaten Manggarai Barat.
- 2) Data Sekunder diperoleh peneliti melalui dokumen kebijakan, sumber berita, artikel jurnal dan berbagai literasi-literasi terkait berupa tata cara pelaksanaan dan penerapan *e-government* sebagai media promosi pariwisata di kabupaten Manggarai Barat.

### D. Informan Penelitian

Dalam proses pemilihan dan penentuan sumber data terkait informan penelitian dalam hal ini adalah peneliti mengambilnya dari Dinas Komunikasi dan Informasi dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan kabupaten Manggarai Barat dan kemudian akan disesuaikan dengan kebutuhan peneliti saat berada di lapangan. Dengan demikian, dibawah ini adalah tabel informan penelitiannya yakni sebagai berikut :

No	Jabatan atau status informan	Jumlah Informan
1	Dinas Kominfo Kab. Manggarai Barat	3 orang
2	Dinas Pariwisata & Kebudayaan Kab. MABAR	3 orang

### E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pendekatan riset kualitatif, ada beberapa cara yang kerap kali dipakai untuk melakukan pengumpulan data. Adapun cara-cara yang sering dipakai oleh peneliti adalah sebagai berikut :

#### 1) Observasi

Pada tahap ini, peneliti hadir langsung di lapangan dan mengamati atau mengindera berbagai aktivitas dan kegiatan serta fenomena-fenomena dari objek penelitian dengan mengvisualisasikan dalam bentuk catatan lapangan.

#### 2) Dokumentasi

Cara ini digunakan dengan melakukan analisis data dari informan riset. Dokumentasi yang dilakukan dapat diabadikan dengan gambar dan foto. Melakukan analisis dokumen terkait, berupa aturan-aturan tentang implementasi elektronik *goverment* yang ada di Indonesia khususnya yang ada di Kabupaten Manggarai Barat

#### 3) Wawancara

Adalah cara pengumpulan data melalui tatap muka secara langsung dengan informan riset dalam bentuk tanya jawab. Jadi, wawancara tersebut konteksnya langsung antara peneliti dan informan. Hal ini dilakukan bukan saja dalam rangka untuk mendapatkan sebuah jawaban atas pertanyaan

riset. Gestur tubuh dari informan juga akan mempengaruhi kualitas informasi dan data yang hendak digali oleh seorang peneliti.

## **F. Teknik Analisa Data**

Tahap analisa data riset seperti yang dijelaskan oleh Sugiyono (2008), dapat dilakukan saat dirumuskan dan dijabarkannya persoalan-persoalan riset tanpa terlebih dahulu turun ke tempat dimana riset tersebut akan dilaksanakan. Hal ini dilakukan secara berkelanjutan hingga pada tahap akhir penyusunan simpulan riset. Dengan demikian, terdapat beberapa tahap analisis data riset yang digunakan oleh peneliti, yakni sebagai berikut ini

- 1) Reduksi data, dimana data riset yang sebelumnya telah diperoleh diringkas kembali, disederhanakan, diabstraksikan dan dirangkum sedemikian rupa hingga sampai pada tahap data-data inti terkumpul. Perlakuan ini dilaksanakan secara berkelanjutan saat riset sedang berlangsung hingga pada tahap analisa data yang selanjutnya disajikan.
- 2) Display data, menyusun kembali data-data riset yang sebelumnya telah direduksi dengan rapi agar mudah dimengerti oleh pembaca terhadap data riset yang ada. Selanjutnya data tersebut diuraikan dengan mendeskripsikannya, juga dapat ditampilkan dalam bentuk tabel dan bagan-bagan agar dapat menentukan proses riset selanjutnya, sesuai dengan apa yang ingin dicapai dalam riset tersebut.
- 3) Penarikan simpulan, pada tahap ini dilakukan dengan membuat simpulan awal berdasarkan temuan-temuan saat data riset disajikan. Temuan-temuan tersebut kemudian disesuaikan dengan keadaan di lapangan. Setelah data-

data riset tersebut dianggap valid dan dirasa konsisten, maka langkah selanjutnya adalah membuat kesimpulan akhir.

Pendekatan riset kualitatif yang digunakan bersifat induktif untuk menganalisis data-data risetnya. Analisa data dalam riset kualitatif lebih bersifat subjektif melibatkan emosi dan perasaan peneliti di dalamnya. Oleh karena itu, data-data yang telah terkumpul diabstraksikan dalam sebuah kalimat dan bukan dalam bentuk angka-angka. Kegiatan dalam menganalisa data riset kualitatif bersifat interaktif dan berkelanjutan secara langsung sampai pada proses kejenuhan data diperoleh. Kejenuhan data dapat terjadi ketika data-data dan informasi-informasi terkait fokus penelitian tidak lagi tercapai saat riset sedang berlangsung.

#### **G. Pengabsahan Data**

Triangulasi data dalam pendekatan riset kualitatif sebagaimana dijelaskan oleh Sugiyono (2016) merupakan suatu upaya menemukan data riset yang valid setelah menguji keaslian dan tingkat kebenaran data dengan mengecek serta melakukan perbandingan terhadap data yang telah dikumpulkan sebelumnya melalui beberapa sumber data lainnya. Kegiatan pengecekan sumber data lainya dapat dilakukan dengan cara berikut ini :

- 1) Triangulasi Data, kegiatan ini dilakukan terhadap berbagai sumber data riset yang ada. Data tersebut kemudian dibandingkan dengan data-data lainnya dengan hasil catatan lapangan, hasil catatan wawancara yang diurai secara terperinci melalui kutipan langsung terkait validitas daya yang ada.

- 2) Triangulasi Metodologi, dengan menggunakan beberapa teknik untuk mengumpulkan data riset berupa informasi atau dokumen-dokumen agar diuji kredibilitas datanya melalui pengecekan sumber data yang sama namun menggunakan teknik yang berbeda.
- 3) Triangulasi waktu melalui cara penguraian ulang hasil catatan lapangan yang ada dengan hasil interview informan riset pada waktu yang telah ditentukan sebelumnya. Perubahan pola pikir informan riset sewaktu-waktu dapat berubah yang sering ditemukan oleh peneliti ketika sebuah riset sedang dilaksanakan. Oleh karena itu, perlu kiranya melakukan wawancara dan membuat catatan lapangan secara berulang-ulang kali.



## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Keadaan Geografis dan Batas Wilayah Kabupaten Manggarai Barat**

Labuan Bajo sebagai Ibu kota Kabupaten Manggarai Barat menjadi sebuah daerah administrasi baru dari wilayah Kabupaten Manggarai sebagai daerah asal pemekarannya. Kabupaten Manggarai Barat menjadi daerah otonom baru berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003.

Secara astronomi, Kabupaten Manggarai Barat berada antar 080.14 $\square$  LU-080.30 $\square$  LS, 1990.30 $\square$  BT-1200.30 $\square$  BT. Provinsi Nusa Tenggara Barat menjadi batas bagian barat Kabupaten Manggarai Barat, tepatnya berbatasan langsung dengan Selat Sape. Berikut di bawah ini adalah batas wilayah daerah Kabupaten Manggarai Barat :

- a) Laut Flores menjadi batas bagian Utara
- b) Laut Sawu, batas bagian Selatan
- c) Kabupaten Manggarai, batas bagian Timur
- d) Selat Sape Provinsi NTB, batas bagian Barat

Secara administrasi, terdapat tujuh (7) daerah Kecamatan, Desa sebanyak 116 dan Kelurahan ada lima (5) yang tercatat dalam wilayah Kabupaten Manggarai Barat. Secara keseluruhan luas wilayah daerah Kabupaten Manggarai Barat adalah 9.450,00 km<sup>2</sup>. Luas wilayah perairan adalah 6.052,50 km<sup>2</sup> dan luas wilayah daratannya adalah 2.947,50 km<sup>2</sup>. Pulau Rinca, pulau Komodo dan pulau Padar adalah sejumlah pulau-pulau besar yang

ada di wilayah daerah Kabupaten Manggarai Barat. Namun juga terdapat pulau-pulau kecil lainnya, seperti Pulau Longos, Pulau Bajo dan pulau Seba yang tidak berpenghuni. Lebih jelasnya, berikut di bawah ini ada peta wilayah daerah kabupaten Manggarai Barat, yakni :

**Gambar : 4.1 Peta Wilayah Kabupaten Manggarai Barat**



Sumber : Profil Kabupaten Manggarai Barat

## 2. Topografi Kabupaten Manggarai Barat

Keadaan topografis kabupaten Manggarai Barat bervariasi berdasarkan bentuk relief, kemiringan lereng, dan ketinggian dari permukaan air laut. Ketinggian wilayah kabupaten Manggarai Barat menunjukkan ketinggian yang bervariasi pula yakni kelas ketinggian kurang dari 100m dari permukaan laut sebanyak 23%, 100-500m dari permukaan laut sebanyak 47%, 500-1000m dari permukaan air laut sebanyak 25% dan kemiringan lerengnya bervariasi antara 0-2%, 2-15%, 15-40% dan di atas 40%. Namun dapat dikatakan bahwa secara umum wilayah kabupaten Manggarai Barat memiliki topografi berbukit-bukit dan pengunungan.

## 3. Demografi Kabupaten Manggarai Barat

### a) Kependudukan

Penduduk kabupaten Manggarai Barat berdasarkan data angregat kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2017 adalah sebanyak 256.491 jiwa yang terdiri dari 128.932 laki-laki dan 127.559 perempuan. Rasio jenis kelamin 101 yang berarti dari 100 perempuan terdapat 101 laki-laki.

Berikut di bawah ini adalah tabel jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin pada tahun 2017 :

**Tabel : 4.1 Jumlah Penduduk Kabupaten Manggarai Barat Berdasarkan Jenis Kelamin/Kecamatan**

No	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Macang Pacar	15.989	15.930	31.917
2	Kuwus	12.663	12.712	25.375
3	Lembor	17.104	17.171	34.275
4	Lembor Selatan	12.300	12.129	24.429
5	Sano Ngoang	7.425	7.358	14.783
6	Komodo	25.894	25.170	51.064
7	Boleng	9.758	9.517	19.275
8	Welak	10.885	10.589	21.474
9	Ndoso	10.252	10.231	20.483
10	Mbeliling	6.664	6.752	13.416
<b>Total</b>				<b>256.491</b>

*Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2017*

#### 4. Visi Misi Kabupaten Manggarai Barat

##### a. Visi

“Menuju kabuapten Manggarai Barat yang ramah, maju dan sejahtera”.

## b. Misi

Berikut ini adalah Misi dari kabupaten Manggarai barat untuk mewujudkan visi yang telah disebutkan di atas :

- 1) “Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan kesehatan, pendidikan, pengembangan keterampilan dan perlindungan social”
- 2) “Meningkatkan pembangunan ekonomi yang berdaya saing berbasis agrowisata dan agribisnis dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia, sumber daya manusia berkualitas, kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berwawasan lingkungan”
- 3) “Mengembangkan infrastruktur dan konektivitas antar daerah yang mendukung pertumbuhan sector riil dan pelayanan public”
- 4) “Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan aparatur sipil negara dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan public”
- 5) “Meningkatkan kesadaran hukum, politik, budaya, dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan” Struktur Organisasi

## 5. Struktural Keorganisasian

### a. Struktural Keorganisasian Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten

Manggarai Barat

- 1) Kepala Dinaas
- 2) Sekertaris, membidangi :
  - a) Bidang Umum Kepegawian dan Perlengkapan”
  - b) Bidang Keuangan, Progeram dan pelaporan”

- 3) “Bidang budaya, seni dan film membidangi” :
    - a) “Seksi Budaya dan Tradisi”
    - b) “Seksi Seni dan Film”
  - 4) “Bidang Sejarah dan Purbakala membawahi” :
    - a) “Seksi Sejarah”
    - b) “Seksi Kepurbakalaan dan Permuseuman”
  - 5) “Bidang Destinasi dan Pemasaran Pariwisata membawahi” :
    - a) “Seksi Destinasi dan Pemasaran Pariwisata”
    - b) “Seksi Pemasaran dan Pengembangan Sistem Informasi”
  - 6) “Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif membawahi” :
    - a) “Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif”
    - b) “Seksi Penyediaan Prasarana dan Pengembangan Sumber Daya”
  - 7) “Bidang Usaha, Kerja Sama dan Kelembagaan Pariwisata membidangi” :
    - a) “Seksi Usaha dan Jasa Pariwisata”
    - b) “Seksi Kerja Sama dan Kelembagaan Pariwisata”
- b. Struktural Keorganisasi Dinas Informasi dan Komunikasi Kabupaten Manggarai Barat
- 1) Kepala Dinas
  - 2) Sekertaris membidangi :
    - a) “Sub bidang Umum, Kepagawaian dan Perlengkapan”
    - b) “Sub bidang Progera, Keuangan dan Pelaporan”
  - 3) “Bidang Komunikasi membidangi” :

- a) “Seksi Pengelolaan Opini, Aspirasi Publik dan Penyiaran”
  - b) “Seksi Kelembagaan dan Kemitraan Media”
- 4) “Bidang Informasi membidangi” :
- a) “Seksi Pengelolaan Informasi Publik”
  - b) “Seksi Statistik dan Persandian”
- 5) “Bidang *E-government* membidangi” :
- a) “Seksi Infrastruktur dan Teknologi”
  - b) “Seksi Aplikasi”
  - c) “Seksi Layanan *E-government*”

#### **6. Profil Pariwisata Labuan Bajo**

Presiden Joko Widodo telah mencanangkan lima destinasi wisata super prioritas yang akan dikembangkan secara serius pada tahun 2020 ini. Dalam rapat terbatas di istana Negara, pemerintah memutuskan bahwa Labuan Bajo menjadi salah satu daerah destinasi super prioritas itu. Keputusan tersebut tidak salah lagi, mengingat potensi wisata yang ada di Labuan Bajo Manggarai Barat ini sangat menakjubkan dan tentunya dapat memanjakan mata kita dengan keindahan-keindahan yang ditawarkan. Berikut ini adalah beberapa destinasi wisata yang ada di Labuan Bajo Manggarai Barat :

## a) Pulau Padar



Sumber Gambar : <https://www.tripzilla.id/>

Merupakan pulau paling besar ketiga yang terdapat di kawasan TNK (Taman Nasional Komodo). Pulau ini relative lebih rapat ke pulau Rinca daripada ke pulau Komodo yang terpisahkan oleh selat Lintah. Pulau Padar tidak di diami oleh Ora (sebutan untuk komodo oleh masyarakat lokal). Pulau Padar juga dikenal sebagai Situs Warisan Dunia UNESCO, selain Pulau Komodo, Pulau Rinca, dan Gili Motang.

## b) Pulau Kelor



Sumber Gambar : <https://www.tripzilla.id/>

Hamparan pasir putih yang lembut, ombak yang tenang dan panorama alam yang indah dengan latar pemandangan bukit. Salah satu aktivitas yang sering dilakukan adalah dengan *trekking* ke bukit yang terletak persis di tengah pulau. Selain dikenal dengan lanskapnya yang indah, keindahan bawah lautnya juga masih terjaga, seperti terumbu karang yang cocok untuk *snorkeling* dan *free diving*.

c) Pulau Komodo



Sumber Gambar : <https://www.tripzilla.id/>

Daya tarik utama Taman Nasional Komodo adalah adanya reptil raksasa purba Biawak Komodo (*varanus komodoensis*), dengan keasliannya dan kekhasan alamnya, khususnya panorama savanna, panorama bawah lautnya merupakan daya tarik pendukung yang potensial. Wisata bahari misalnya, memancing, *snorkeling*, *diving* dan kano (bersampan). Loh Liang pulau Komodo merupakan pintu masuk utama. Aktivitas yang dapat dilakukan di Loh Liang Komodo antara lain, pengamatan satwa komodo,

rusa, burung dan aktivitas lainnya seperti pendakian, penjelajahan, *photo hunting*, dan *video shooting*.

Berbicara terkait masalah daya tarik wisata dan destinasi wisata yang ada di kabupaten Manggarai Barat sebenarnya masih cukup banyak. Sebut saja seperti, Pink Beach, Pulau Kalong, Gili Laba atau Gili Lawa Darat, Pulau Kenawa, Goa Rangko, Goa Batu Cermin, Taka Makassar, Air terjun Cunca Wulang, Manta Point surge bagi pecinta *diving* dan masih banyak lainnya.

## **B. Hasil dan Pembahasan**

### **1. Dimensi Kebijakan**

Dalam rangka mencapai sasaran pembangunan kepariwisataan nasional, pemerintah pusat telah mengeluarkan suatu kebijakan sebagai pedoman umum bagi kementerian, lembaga dan pemerintah daerah yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata. Produk kebijakan tersebut kemudian dipertegas dengan hadirnya Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional tahun 2010-2025 sebagai aturan pelaksana undang-undang tersebut.

Pengembangan pariwisata nasional dapat dilaksanakan melalui pembangunan Destinasi Pariwisata Nasional (DPN) sebagaimana dijelaskan dalam pasal 7 Ayat (a), berikut ini :

- 1) Perwilayahan pembangunan DPN dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN)
- 2) “Pembangunan Daya Tarik Wisata (DTW)”

- 3) “Pembangunan aksesibilitas pariwisata”
- 4) “Pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata”
- 5) “Pengembangan investasi di bidang pariwisata”

Sebagai bentuk konsistensi dan komitmen untuk mendukung terwujudnya visi pembanguana pariwisata nasional, maka pemerintah Kabupaten Manggarai Barat mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kepariwisataan Daerah. Ditetapkannya Kabupaten Manggarai Barat sebagai salah satu daerah Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) khususnya Labuan Bajo sebagai Ibu Kota Kabupaten, maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2018 tentang Badan Otoritas Pengelola Kawasan Pariwisata Labuan Bajo yang disingkat dengan BOP LBF. Hal ini adalah bentuk penegasan dari pelaksanaan PP Nomor 50 Tahun 2011 tepatnya pasal 7 Ayat (a) di atas.

Agar cita-cita pembangunan pariwisata nasional dapat terwujud, tentu harus diupayakan sebuah terobosan baru sebagai bentuk inovasi dalam memberikan pelayanan bidang pariwisata oleh pemerintah, kementerian, lembaga dan pemerintah daerah. Pelayanan bidang pariwisata dituntut untuk efektif, efisien, transparan, akuntabel dan melibatkan keikutsertaan masyarakat, dunia usaha dan kelompok-kelompok kepentingan lainnya.

Menyadari akan tuntutan pelayanan publik yang prima maka pemerintah, kementerian, lembaga dan pemerintah daerah merespon hal tersebut dengan mengeluarkan beberapa kebijakan yang mengarah pada

layanan pariwisata yang inovatif melalui pengaplikasian media elektronik berbasis internet. Kebijakan-kebijakan tersebut dituangkan dalam aturan-aturan berikut ini :

- 1) Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Elektronik *Government*
- 2) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
- 3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Oleh karena itu, guna mewujudkan visi pembangunan kepariwisataan nasional, maka pemerintah, kementerian, lembaga dan pemerintah daerah sekiranya perlu menetapkan program prioritas nasional melalui peningkatan promosi wisata nasional berbasis online dengan mendigitalisasi layanan publik bidang pariwisata yang dituangkan dalam kebijakan-kebijakan yang terukur, jelas dan tepat sasaran dengan langkah-langkah berikut ini :

- 1) Promosi melalui media sosial, elektronik dan media cetak
- 2) Promosi pariwisata disimpul moda transportasi
- 3) Promosi Mice
- 4) Peningkatan citra pariwisata nasional
- 5) Branding Wonderful Indonesia

Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebagai pelaksana teknis promosi bidang pariwisata bersama

Dinas Informasi dan komunikasi sebagai penyedia layanan SPBE sama-sama mempunyai peran penting dalam mewujudkan misi pembangunan kepariwisataan nasional di level daerah.

FN sebagai kepala seksi pemasaran dan promosi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai Barat saat ditemui di ruang kerjanya mengatakan bahwa :

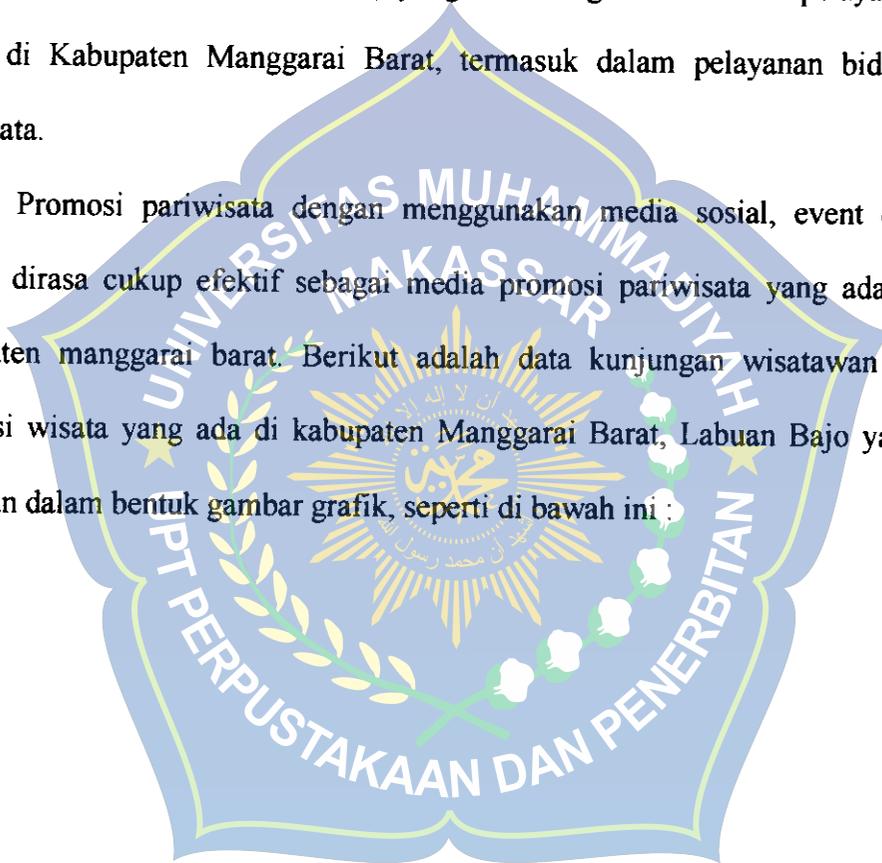
“Dari sisi kebijakan, dinas pariwisata dan kebudayaan sendiri baru menggunakan media social seperti facebook, instagram dan youtube dengan nama *'Enchanting Labuan Bajo'*. Pada tahun-tahun sebelumnya, kami masih menggunakan media konvensional dalam melakukan promosi pariwisata seperti promosi melalui event dan festival komodo, brosur serta travel agent. Promosi konvensional sudah mulai kami tinggalkan karena memakan biaya yang cukup tinggi dan kurang efektif dan efisien. Pada tahun 2019 sendiri, jumlah kunjungan wisatawan mengalami peningkatan tajam dengan jumlah 187.098 jika dibandingkan dengan kunjungan wisatawan pada tahun-tahun sebelumnya”.

(Wawancara dengan FN selaku kepala seksi pemasaran dan promosi Dinas pariwisata kab. Manggarai barat tanggal 14 desember 2020)

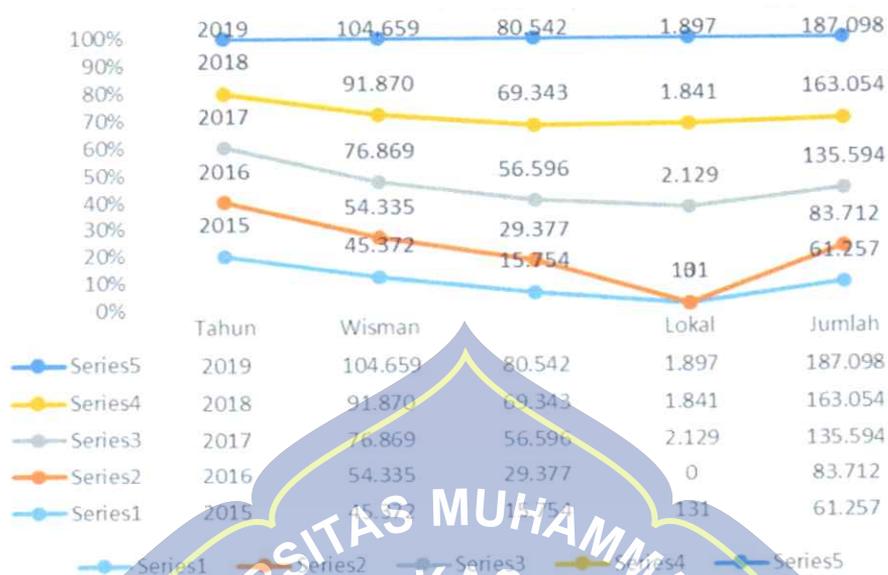
Dari hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Manggarai Barat telah menggunakan beberapa media sosial dalam melakukan promosi pariwisata, seperti Facebook, Instagram dan You Tube serta melalui event dan festival komodo. Tentu hal tersebut sudah sesuai dengan arahan program prioritas peningkatan promosi pariwisata Indonesia bila merujuk pada peraturan pemerintah tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional. Hal ini juga diperkuat dengan Misi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai Barat tentang “meningkatkan promosi pariwisata”. Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat sebagai bagian dari aktor pembangunan di level daerah juga menyambut baik

Instruksi Presiden dengan menetapkan Peraturan Bupati Kabupaten Manggarai Barat Nomor 64 Tahun 2018 Tentang Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (*E-Government*). Rencana Induk SPBE Kabupaten Manggarai Barat ini kemudian menentukan program prioritas dalam bentuk pengesahan kebijakan implementasi SPBE yang terintegrasi di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada sebagai standarisasi pelayanan publik di Kabupaten Manggarai Barat, termasuk dalam pelayanan bidang pariwisata.

Promosi pariwisata dengan menggunakan media sosial, event dan festival dirasa cukup efektif sebagai media promosi pariwisata yang ada di Kabupaten manggarai barat. Berikut adalah data kunjungan wisatawan ke destinasi wisata yang ada di kabupaten Manggarai Barat, Labuan Bajo yang disajikan dalam bentuk gambar grafik, seperti di bawah ini :



**Gambar : 4.2 Data Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Manggarai Barat**



Sumber : Dinas Pariwisata & Kebudayaan Kabupaten Manggarai Barat tahun 2019

Berdasarkan gambar grafik kunjungan wisatawan yang diperoleh dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Manggarai Barat di atas, dapat diketahui bahwa jumlah kunjungan wisatawan mancanegara, wisatawan nusantara dan wisatawan lokal mengalami tren peningkatan kunjungan yang sangat signifikan dari tahun ke tahun yakni terhitung dari tahun 2015-2019. Meskipun dapat dilihat pada tahun 2016 untuk wisatawan lokal nol jumlah kunjungannya. Namun mengalami peningkatan kunjungan di tahun 2017 hingga pada tahun 2019.

Guna mendapatkan hasil penelitian yang relevan maka langkah selanjutnya yang dilakukan oleh peneliti adalah melakukan triangulasi sumber dengan wawancarai kepala Dinas Informasi dan Komunikasi Kabupaten

Manggarau Barat. Saat ditemui di ruang kerjanya dan Beliau mengatakan bahwa :

“Dari sisi kebijakan kami di daerah mengacuh pada aturan nasional tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Kami dari Dinas Informasi dan Kebudayaan sebagai suport dalam menyediakan dan menjamin kelancaran kualitas jaringan internet yang ada di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak terkecuali Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Secara lebih terperinci kami menyediakan Sumber Daya Manusianya (SDM) yang bisa mengaplikasikan SPBE dan infarastrutur IT yang walaupun sampai saat ini belum memadai namun dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dari sisi infrastruktur dan peningkatan dari anggarannya”. (Wawancara dengan kepala Dinas Infokom manggarai barat DJ tanggal 16 Desember 2020)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa Dinas Informasi dan Komunikasi Kabupaten Manggarai Barat berpedoman pada Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang disingkat dengan istilah SPBE bagi percepatan pelayanan publik bidang pariwisata yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Hadirnya SPBE ini merupakan bentuk tindak lanjut dari Instruksi Presiden Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Elektronok *Government* yang tertuang dalam Inpres Nomor 3 Tahun 2003.

Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat sebagai bagian dari aktor pembangunan di level daerah juga menyambut baik Instruksi Presiden dengan menetapkan Peraturan Bupati Kabupaten Manggarai Barat Nomor 64 Tahun 2018 Tentang Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (*E-Government*). Rencana Induk SPBE Kabupaten Manggarai Barat ini kemudian menentukan program prioritas dalam bentuk pengesahan kebijakan

implementasi SPBE yang terintegrasi di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada sebagai standarisasi pelayanan publik di Kabupaten Manggarai Barat, termasuk dalam pelayanan bidang pariwisata.

Senada dengan hal diatas, lebih lanjut peneliti juga melakukan wawancara dan analisis terhadap dokumen-dokumen kebijakan yang mengarah pada penerapan *elektronik government* yang sekarang ini lebih dikenal dengan sebutan SPBE dengan kepala seksi pelayanan *elektronik government* Dinas Informasi dan Komunikasi Kabupaten Manggarai barat sebagai berikut :

“Sejak terbentuknya Dinas Informasi dan Komunikasi kabupaten Manggarai Barat Januari 2017. Langkah awal yang dilakukan dari sisi kebijakannya adalah menyusun Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (E-government) Kabupaten Manggarai Barat yang tertuang dalam Peraturan Bupati Manggarai Barat nomor 64, yang memuat tentang dimensi kebijakan, dimensi kelembagaan, dan dimensi infrastrukturnya. Dinas infokom sebagai leading sector penyedia jaringan internet di semua OPD yang ada sangat mendukung dari segi kebijakan pengadaan infrastruktur IT”.

(Wawancara dengan FZ kepala seksi pelayanan *e-government* Dinas Infokom tanggal 15 Desember 2020)

Dari hasil wawancara di atas diketahui bahwa dalam upaya mendukung percepatan layanan publik yang efektif, efisien , transparan dan akuntabel dengan melibatkan partisipasi masyarakat Dinas Informasi dan Komunikasi berupaya menyusun sebuah kerangka kaerja melalui Peraturan Bupati Kabupaten Manggarai Barat Nomor 64 tentang Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang kemudian dikenal dengan sebutan SPBE. Penyusunan Rencana Induk SPBE bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaran tata kelola pemerintahan yang baik dalam hal kemudahan

layanan publik dengan pendekatan transformasi digital dalam memberikan layanan kepada masyarakat termasuk dalam hal promosi pariwisata berbasis online di Kabupaten Manggarai Barat.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan analisis dokumentasi yang telah dilakukan terhadap informan penelitian serta beberapa sumber data penelitian di atas, maka dapat diketahui ada beberapa kebijakan-kebijakan yang digunakan untuk mendukung kegiatan promosi pariwisata yang ada di Kabupaten Manggarai Barat. Kebijakan-kebijakan tersebut adalah sebagai berikut :

- a) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional tahun 2010-2025
- c) Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Badan Otoritas Pariwisata (BOP) Labuan Bajo Flores
- d) Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Elektronik Government
- e) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
- f) Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Sistem Kepariwisataan Daerah
- g) Peraturan Bupati Kabupaten Manggarai Barat Nomor 64 Tahun 2018 Tentang Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

- h) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

## 2. Dimensi Kelembagaan

Terkait dengan dimensi kelembagaan dalam promosi pariwisata sudah diatur dengan jelas pada Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional tahun 2010-2025. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa kelembagaan dalam promosi pariwisata sangat bergantung pada koordinasi lintas sektor antara pemerintah, kementerian, pemerintah daerah dan pihak bisnis dengan mengikutsertakan masyarakat secara masif dan berkesinambungan. Konsep pembangunan kelembagaan dalam promosi pariwisata tentu harus diperkuat dengan melakukan hal-hal berikut ini :

- a) Penguatan organisasi kepariwisataan
- b) Pembangunan SDM pariwisata dan
- c) Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan

Komitmen dan profesionalitas kelembagaan dalam melakukan promosi pariwisata adalah kunci keberhasilan dalam mewujudkan cita-cita pembangunan kepariwisataan nasional. Berkualitasnya kelembagaan pariwisata dalam melakukan promosi pariwisata tentu akan membawa dampak yang positif terhadap keberlangsungan destinasi pariwisata yang ada. Sebaliknya, juga dapat dikatakan bahwa tidak berkualitasnya sebuah destinasi pariwisata

disebabkan oleh ego sektoral antara kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan kelompok-kelompok kepentingan lainnya.

Hadirnya Badan Otoritas Pariwisata (BOP) Labuan Bajo Flores sebagai salah satu kelembagaan pariwisata yang ada di Kabupaten Manggarai Barat melalui Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2018 adalah bentuk komitmen pemerintah dalam menggenjot pembangunan kepariwisataan nasional. Dengan demikian, secara kuantitas dapat dikatakan bahwa kelembagaan pariwisata yang ada di Kabupaten ini cukup memadai di tambah dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

Oleh karena itu, kelembagaan pariwisata yang ada tentu harus diakselerasi dengan penguatan SDM pariwisata. Kelembagaan pariwisata dan SDM pariwisata adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Kelembagaan pariwisata tidak dapat berjalan dengan baik hanya dari sisi kuantitasnya. Namun juga harus diperhatikan dari sisi kualitas baik dari kelembagaan pariwisata maupun dari SDM pariwisatanya.

Berbicara tentang dimensi kelembagaan dalam promosi pariwisata berbasis online, tentu dibutuhkan koordinasi antar lembaga atau instansi yang teritegrasi dalam satu wadah yang menunjang keberhasilan promosi pariwisata tersebut. Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat dalam hal ini adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebagai bagian dari kelembagaan pariwisata dituntut kerja ekstra dalam melakukan promosi pariwisata dengan pendekatan teknologi informasi dan komunikasi yang teritegrasi.

FN sebagai Kepala seksi pemasaran dan promosi pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai Barat, saat diwawancarai di ruang kerjanya mengungkapkan bahwa :

“Kami dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan ada bidang destinasi dan pemasaran pariwisata. Sementara itu, di Badan Otoritas Pariwisata Labuan Bajo (BOP) juga ada khusus menangani pemasaran pariwisata Labuan Bajo melalui divisi pemasaran. Kami tidak bekerja sendiri, kami juga pernah terlibat langsung terkait penjualan paket pariwisata Labuan Bajo di Bali pada *event Bali and Beyond Travel fair (BBTF)* dan di level pusat ada Kementerian Pariwisata dengan *take line Wonderful Indonesia* (Wawancara dengan FN kepala seksi pemasaran dan promosi pariwisata dinas pariwisata dan kebudayaan tanggal 17 Desember 2020)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat dikatakan bahwa terkait koordinasi dan kerja sama kelembagaan pariwisata yang ada di Kabupaten Manggarai Barat dapat dikatakan efektif dalam hal melakukan promosi pariwisata. Upaya kerja sama dan koordinasi dalam melakukan promosi pariwisata Kabupaten Manggarai barat sudah melibatkan berbagai instansi dan lembaga dan kelompok kepentingan lainnya.

Langkah selanjutnya, peneliti melakukan pengabsahan data melalui triangulasi teknik pada data dokumentasi dan observasi terkait kelembagaan pariwisata dalam kegiatan promosi pariwisata yang telah dilakukan oleh beberapa instansi atau lembaga yang ikut terlibat dalam promosi pariwisata Labuan Bajo, yakni sebagai berikut :

**Gambar : 4.3 Diskusi Kelembagaan Pariwisata Dan Promosi Pariwisata**



Sumber : /BOP LB Kabupaten Manggarai Barat tahun & <https://www.indonesiatravelnews/> tahun 2019

Guna mewujudkan pembangunan pariwisata nasional yang berdaya saing, maka upaya-upaya koordinasi yang bersifat masif harus terus di dengarkan oleh pemerintah, kementerian, pemerintah daerah dan kelompok-kelompok kepentingan lainnya. Salah satu bentuk konsistensi dan komitmen pemerintah daerah Kabupaten Manggarai Barat dalam hal ini adalah Dinas Informasi dan Komunikasi sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap setiap proses layanan SPBE.

FZ selaku kepala seksi pelayanan elektronik *government* Dinas Informasi dan Komunikasi Kabupaten Manggarai Barat menuturkan bahwa :

“Secara teknis, dalam melakukan promosi pariwisata ada dinas pariwisata dan kebudayaan dan didukung juga oleh Badan otoritas pariwisata (BOP) Labuan Bajo. Sementara itu, kami dari dinas infokom mensupport dari sisi teknologi dan ketersediaan jaringan internet di semua OPD yang ada di Manggarai Barat, kami menyediakan infrastruktur websitenya, aplikasinya semua kami siapkan dengan sendirinya mereka yang mengelola sesuai dengan kebutuhan dan kebijakan masing-masing lembaga”. (Wawancara dengan FZ tanggal 22 Desember 2020)

Wawancara di atas menunjukkan bahwa dari sisi kelembagaan pariwisata di Kabupaten Manggarai Barat ada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan Badan Otoritas Pariwisata (BOP) Labuan Bajo Flores. Sedangkan Dinas Informasi dan Komunikasi memiliki fungsi sebagai penyedia jaringan internet dan layanan digital pemerintah lainnya sebagai integritas lembaga-lembaga atau instansi dalam mendukung promosi pariwisata berbasis online yang ada.

Sesuai dengan amanah Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Kominfo diberi tanggung jawab dalam membangun infrastruktur IT dan Aplikasi SPBE Nasional (pasal 4). Ketersediaan infrastruktur IT dalam mendukung layanan publik masih terkendala pembangunan Pusat Data Nasional (PDN) yang belum tersedia dan masih menggunakan Pusat Data Sementara (PDS). Pembangunan PDN ini merupakan jawaban atas tuntutan terhadap pengelolaan pemerintahan yang baik, yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel.

Sementara itu, berbeda halnya dengan apa yang disampaikan oleh kepala Dinas Informasi dan Komunikasi Kabupaten Manggarai Barat saat di wawancarai di ruang kerjanya yakni sebagai berikut :

“Sesuai dengan tupoksinya bahwa Dinas Infokom menyebarluaskan kebijakan atau program dan potensi yang ada di kabupaten Manggarai Barat. Dari segi potensi bahwa leading sektornya adalah pariwisata yang mana dunia internasional juga telah mengetahui itu”.

Lebih lanjut beliau menjelaskan bahwa :

“Kominfo sudah melakukan kerja sama atau MOU dengan koran-koran lokal seperti Flores Post kemudian wartawan lokal dan secara nasional ada

Dirga Antara dengan mengirim berita-berita tentang potensi pariwisata Labuan Bajo”.

(Wawancara dengan DJ tanggal 16 Desember 2020)

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan beberapa informan penelitian di atas terkait dimensi kelembagaan diketahui ada beberapa kelembagaan pariwisata yang ada di Kabupaten Manggarai Barat yaitu Dinas Pariwisata dan Kebudayaan bersama Badan Otoritas Pariwisata (BOP) Labuan Bajo Flores. Koordinasi dan kerja sama antar lembaga, instansi dengan kelompok kepentingan lainnya termasuk Dinas Informasi dan Komunikasi telah dilaksanakan.

Keberadaan kelembagaan bidang pariwisata sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional tahun 2010 sampai 2025 mengisyaratkan bahwa :

“Kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi pemerintah, pemerintah daerah, swasta dan masyarakat, SDM, regulasi dan mekanisme operasional yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang kepariwisataan”.

Berdasarkan pengamatan terhadap eksistensi kelembagaan pariwisata yang ada di Kabupaten Manggarai Barat dalam rangka mewujudkan cita-cita dan misi pariwisata Labuan Bajo sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata tahun 2014 sampai 2025, pasal 4 yakni :

“Terwujudnya Manggarai Barat sebagai destinasi pariwisata kelas dunia yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat berlandaskan prinsip ekowisata berbasis masyarakat”.

Sudah melibatkan keikutsertaan masyarakat terhadap pembangunan pariwisata Labuan Bajo. Sosialisasi dan diskusi cukup gencar dilakukan oleh kedua kelembagaan pariwisata yang ada, meskipun tidak secara masif dilakukan.

Untuk ke depannya demi kemajuan pariwisata yang ada di Kabupaten Manggarai Barat tentu langkah-langkah strategis harus dapat dicapai melalui penguatan organisasi/kelembagaan kepariwisataan, pembangunan dan pemberdayaan SDM pariwisata dan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan bidang pariwisata.

### **3. Dimensi Infrastruktur**

Tujuan penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagai dijelaskan dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, efektif, efisien, akuntabel dan terpercaya melalui peningkatan keterpaduan penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Pelaksanaan SPBE secara terpadu dapat memberikan manfaat sebagai berikut ini :

- a) Meningkatnya efisiensi anggaran untuk pembangunan Pemerintahan Berbasis Elektronik
- b) Mendukung terwujudnya Satu Data Indonesia melalui bagi pakai data antar instansi pemerintah dan pemerintah daerah

- c) Mendorong penggunaan aplikasi umum berbagi pakai data antar instansi pemerintah dan pemerintah daerah
- d) Meningkatnya utilisasi infrastruktur TIK dan berbagi pakai antar instansi pusata dan pemerintah daerah
- e) Terwujudnya keamanan informasi pemerintah

Percepatan penerapan SPBE di lingkungan pemerintah, kementerian dan pemerintah daerah dapat dilakukan dengan mengintegrasikan infrastruktur SPBE melalui Pusat Data Nasional (PDN), jaringan nasional intra pemerintah dan manajemen aset infrastruktur TIK.

Bedasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan di Kantor Dinas Informasi dan Komunikasi Kabupaten Manggarai Barat terkait ketersediaan infrastruktur jaringan IT yang mendukung partisipasi masyarakat dalam promosi pariwisata berbasis online di Kabupaten Manggarai Barat masih minim. Partisipasi masyarakat sebagaimana telah dijelaskan dalam misi pembangunan jangka panjang pemerintah Kabupaten Manggarai Barat menjadi tidak terpenuhi lantaran masih ada beberapa daerah yang belum dijangkau oleh jaringan internet.

Pernyataan di atas dibenarkan oleh Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi Kabupaten Manggarai Barat saat ditemui di ruang kerjanya. Lebih lanjut Beliau mengatakan bahwa :

“Terkait infrastruktur jaringan internet untuk kota Labuan Bajo saya rasa sudah cukup memadai terutama untuk kebutuhan berbagai OPD yang ada di Kabupaten Manggarai Barat ini. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah apa hubungannya dengan promosi pariwisata berbasis online ? Sudah sangat jelas bahwa kami dari Dinas Informasi dan Komunikasi Kabupaten

Manggarai Barat bekerja sama dengan Dirjen BAKTI KOMINFO bersama Telkom melakukan pengadaan dan pemasangan tower-tower BTS untuk mensupport kegiatan promosi pariwisata secara online ya meskipun harus diakui bahwa masih terdapat beberapa desa di daerah Kabupaten Manggarai Barat yang belum dijangkau oleh jaringan internet” . (Wawancara dengan DJ tanggal 16 Desember 2020)

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dengan Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi Kabupaten Manggarai Barat, dapat diketahui bahwa minimnya ketersediaan infrastruktur jaringan TI berbanding lurus dengan tingkat partisipasi masyarakat Kabupaten Manggarai Barat dalam keikutsertaannya melakukan promosi pariwisata berbasis online. Minimnya ketersediaan infrastruktur jaringan TI dapat dilihat melalui tabel di bawah ini :

**Tabel : 4.2 Daerah Blank Spot Kabupaten Manggarai Barat**

No	Kecamatan	Jumlah Desa	Tahun 2018
1	Kuwus	11	0
2	Lembor	19	0
3	Lembor Selatan	12	1
4	Kuwus Barat	10	1
5	Mbeliling	15	1
6	Sano Nggoang	15	1
7	Ndoso	13	2
8	Pacar	15	3
9	Boleng	15	4
10	Komodo	13	4
11	Welak	15	8
12	Macang Pacar	16	9
<b>Total</b>		<b>169</b>	<b>34</b>

Sumber : Dinas Informasi & Komunikasi  
Kabupaten Manggarai Barat 2019

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa minimnya infrastruktur IT diperparah juga dengan keadaan topografi Kabupaten Manggarai Barat. Kabel Fiber Optik (FO) dari Telkom hanya berada disekitar daerah Ibu Kota Kabupaten Manggarai Barat dan di Kecamatan Lembor. Sementara untuk delapan (8) Kecamatan lainnya masih belum dilalui oleh kabel FO. Hal ini tentu berdampak terhadap ketidakjangkauan jaringan internet (daerah *blank spot*) di beberapa titik desa-desa yang ada di beberapa kecamatan lainnya.

Sehingga dapat dikatakan bahwa ketersediaan infrastruktur IT dalam hal mendukung promosi pariwisata berbasis online di Kabupaten Manggarai Barat menjadi sangat diperlukan melalui sebuah produk kebijakan, baik dari sisi anggaran untuk pengadaan infrastruktur jaringan IT maupun infrastruktur-infrastruktur penunjang lainnya. Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat tentu harus segera berbenah diri dalam rangka mewujudkan pariwisata berkelas dunia sesuai dengan visi dan misi yang telah dicanangkan melalui keikutsertaan masyarakat Manggarai Barat dengan terlebih dahulu menyediakan infrastruktur jaringan IT agar tidak terdapat lagi daerah-daerah *blank spot* sebagai syarat keikutsertaan publik memajukan pariwisata Kabupaten Manggarai Barat.

Pernyataan di atas juga dibenarkan oleh Kepala seksi pemasaran dan promosi pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai Barat saat diwawancarai di ruang kerjanya. Beliau menjelaskan bahwa :

“Untuk saat ini, kami dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai Barat belum memiliki sarana dan prasarana promosi pariwisata

yang memadai. Namun kami sudah merencanakan pengadaan video tron untuk mendukung promosi pariwisata Manggarai Barat. Hanya saja masih terkendala covid 19. Sebagian besar anggaran dialihkan untuk penanganan covid 19. Kalau terkait peralatan atau sarana dan prasarana lainnya kami rasa tidak masalah, kami merasa dengan menggunakan media sosial sudah cukup efektif dalam melakukan promosi pariwisata”.

(Wawancara dengan FN tanggal 14 Desember 2020)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dinas Pariwisata dan kebudayaan, kepala seksi pemasaran dan promosi pariwisata diketahui bahwa keberadaan sebuah infrastruktur jaringan IT menjadi sangat penting. Daya dukung infrastruktur jaringan internet dalam proses memberikan layanan bidang pariwisata menjadi faktor yang harus dapat terpenuhi. Tersedianya layanan komunikasi dan informasi tentu akan mempermudah wisatawan mendapatkan informasi tentang destinasi pariwisata menjadi terpenuhi dengan tepat dan cepat. Ketersediaan Infrastruktur IT yang memadai tentu dapat dikatakan sebagai upaya untuk menarik lebih banyak lagi wisatawan berkunjung ke destinasi-destinasi pariwisata yang ada. Keterbatasan tersebut dapat ditangani dengan penggunaan media sosial seperti facebook, instgram dan youtube.

Upaya-upaya pengembangan dan pembangunan pariwisata sangat bergantung kepada ketersediaan infastruktur IT yang disediakan oleh pengelola pariwisata dalam hal ini adalah pemerintah dan pemerintah daerah. Oleh karena itu, pemerintah sebagai penyedia layanan publik khususnya dalam bidang pariwisata harus meyediakan suatu prodak kebijakan yang mengakomodir semua kebutuhan wisatawan yaitu : terkait kebijakan

kelembagaan pariwisata, infrastruktur pendukung pariwisata, aplikasi layanan informasi pariwisata dan perencanaan yang matang secara berkelanjutan.

Pernyataan di atas juga diperkuat oleh kepala seksi pelayanan *e-government* Dinas Informasi dan Komunikasi Kabupaten Manggarai Barat saat ditemui di ruang kerjanya. Beliau mengatakan bahwa :

“Kalau berkaitan dengan dimensi infrastruktur sendiri tentu tergantung dari kebijakan pengadaan infrastruktur IT dan kebijakan anggaran. Keseluruhan dari semua itu kan adalah tergantung dari kebijakan yang ada tentang pengadaan infrastruktur guna mendukung promosi pariwisata Labuan Bajo. Dalam hal ini berkaitan dengan infrastruktur jaringan dan aplikasi. Kendala terbesar kita adalah keterbatasan anggaran untuk pengadaan Data Center, *Comment Center*, kapasitas gedung kantor dan SDM yang kompeten dalam bidang IT”.

Lebih lanjut beliau menjelaskan bahwa :

“Seperti yang telah diketahui bahwa Dinas Informasi dan Komunikasi Kabupaten Manggarai Barat dalam hal ketersediaan infrastruktur IT adalah sebagai support penyedia jaringan internet di seluruh OPD. Misalnya untuk pengadaan alat video tron promosi outdoor pariwisata harus melalui Dinas Informasi dan Komunikasi Kabupaten Manggarai Barat. Sementara untuk konten atau isi promosi pariwisata adalah merupakan bagian dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai Barat”. (Wawancara dengan FZ tanggal 22 Desember 2020)

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan analisis dokumentasi yang dilakukan di Dinas Informasi dan komunikasi dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai Barat dapat diketahui bahwa dari sisi kebijakan infrastruktur IT masih belum memadai meskipun sudah ada beberapa dokumen kebijakan yang telah ditertuang dalam peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 64 tahun 2018 Tentang Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat yang mengacu

pada penerapan elektronik *government* bagi setiap OPD yang adat, tidak terkecuali bagi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan Dinas Informasi dan Komunikasi.

Ketersediaan infrastruktur jaringan IT merupakan suatu kebutuhan dasar dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik oleh pemerintah terutama dalam bidang pariwisata. Daya dukung infrastruktur dalam kegiatan promosi pariwisata yang ada di Kabupaten Manggarai Barat sangat minim sekali. Kebijakan pengadaan Infrastruktur jaringan IT dengan penyediaan anggaran menjadi sangat penting guna mendukung pariwisata super premium dan super prioritas kawasan Labuan Bajo.

Sementara itu, terkait keadaan objektif tentang ketersediaan infrastruktur jaringan IT di Kabupaten Manggarai barat, berdasarkan pengamatan yang dilakukan di Kantor Dinas Informasi dan Komunikasi sebagai leading sektor penyelenggara Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik bahwa Dinas Informasi dan Komunikasi Kabupaten Manggarai Barat, belum mampu menyediakan akses internet sesuai kebutuhan semua OPD yang ada. Hal ini dikarenakan belum adanya Data Center aplikasi dan sementara waktu masih menggunakan Data Center server jaringan internet. Selain itu, keberadaan sarana dan prasarana gedung Dinas Informasi dan Komunikasi yang belum memadai, SDM yang belum kompeten dalam pengelolaan Data Center turut menjadi faktor kendalanya. Guna meminimalisir kekurangan tersebut, Dinas Informasi dan Komunikasi Kabupaten Mabar dalam melakukan hosting menggunakan tenaga swasta.

#### 4. Dimensi Aplikasi

Perihal rencana induk dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Online (SPBE) secara nasional bertujuan untuk memberikan arah yang terpadu dan berkesinambungan, maka diatur mengenai aplikasi SPBE yang harus digunakan oleh instansi pusat, kementerian dan pemerintah daerah untuk memberikan layanan SPBE. Dimana aplikasi tersebut terdiri atas aplikasi umum dan aplikasi khusus.

Aplikasi umum ini diarahkan sebagai wadah dalam memberikan layanan pemerintah yang berkaitan dengan bidang perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa pemerintah, akuntabilitas kinerja, pemantauan dan evaluasi, kearsipan, kepegawaian dan pengaduan layanan publik. Sementara itu, untuk aplikasi khusus, penggunaannya lebih kepada pengaturan masing-masing instansi yang ada sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang ingin dikembangkan.

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam penyelenggaraan layanan pemerintah, memberikan peluang yang mendorong terwujudnya pemerintah yang transparan, partisipatif, inovatif dan akuntabel serta dapat meningkatkan koordinasi antar pusat dan daerah dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan demi tercapainya tujuan bersama, meningkatkan kualitas dan jangkauan layanan publik kepada masyarakat, sektor bisnis dan kelompok-kelompok kepentingan lainnya.

Berkaca pada keadaan dan kondisi yang ada di Kabupaten Manggarai Barat terkait dimensi aplikasi yang digunakan dalam memberikan pelayan

kepada masyarakat lebih khusus layanan pariwisata berbasis online, terutama terkait aplikasi khusus semisal nya seperti website promosi, aplikasi berbasis android masih belum tersedia. Kebutuhan akan sebuah aplikasi khusus untuk mempromosikan pariwisata yang ada menjadi salah satu faktor suksesnya promosi pariwisata itu sendiri.

FN selaku kepala seksi promosi dan pemasaran pariwisata Kabupaten Manggarai Barat membenarkan pernyataan tersebut saat di wawancarai di ruang kerjanya. Beliau menuturkan bahwa :

“Sejauh ini kami belum memiliki aplikasi khusus untuk kegiatan promosi pariwisata. Kami hanya menggunakan media social seperti facebook, instagram dan youtube karena lebih simple untuk digunakan. Terkait penggunaan aplikasi berbasis android dan website promosi kami masih terkendala SDM dan anggaran. Namun penggunaan facebook, instagram dan youtube sudah cukup untuk meningkatkan kunjungan wisatawan ke Labuan Bajo”. (Wawancara dengan FN tanggal 14 Desember 2020)

Ketersediaan sebuah aplikasi dalam memberikan layanan kepada publik berbasis online adalah sebuah keharusan yang tidak dapat ditawar oleh otoritas publik. Aplikasi berbasis online dikenal dengan sebutan aplikasi SPBE. Reformasi birokrasi dalam segala dimensi harus segera tercapai melalui pelayanan kepada masyarakat, pihak bisnis dan kepada kelompok-kelompok kepentingan lainnya melalui pendekatan efektivitas, efisiensi, partisipasi dan akuntabel terhadap layanan yang diberikan.

Dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dikenal beberapa aplikasi yang terbagi dalam aplikasi umum dan aplikasi khusus. Aplikasi umum digunakan dalam rangka standarisasi pelayanan yang terkoneksi secara terpadu oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun oleh

pemerintah daerah sebagai penyelenggara di tingkat lokal. Sementara itu, aplikasi khusus dipergunakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan khusus tergantung dari kebutuhan masing-masing perangkat dan instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.

Berikut di bawah ini adalah hasil observasi dan analisis dokumen yang telah peneliti lakukan terkait kegiatan promosi pariwisata yang telah dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan kabupaten Manggarai Barat, yakni sebagai berikut :

**Gambar : 4.4 Media Sosial Promosi Pariwisata**



Sumber : Facebook, Instagram & Youtube Dinas Pariwisata dan Kebudayaan MABAR tahun 2020

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis terhadap media promosi yang digunakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai Barat dapat diketahui bahwa keterbatasan aplikasi khusus untuk mendukung promosi pariwisata berbasis online diantisipasi dengan penggunaan media sosial sebagai penggantinya.

Pernyataan di atas kemudian tidak dibenarkan oleh FZ selaku kepala seksi Pelayanan elektronik *government* Dinas Informasi dan Komunikasi

Kabupaten Manggarai Barat ketika diwawancara di runag kerjanya. Beliau mengatakan bahwa :

“Ada beberapa aplikasi yang sudah disediakan oleh Dinas Infokom baik aplikasi berbasis android maupun website untuk melakukan promosi pariwisata dan kami sudah serahkan kepada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai Barat sebagai pengelola konten ataupun isi yang ada dalam aplikasi tersebut. Namun sayangnya kita masih terkendala koordinasi antara dinas-dinas yang ada dalam hal infrastruktur IT dan aplikasi”.

Lebih lanjut Beliau menjelaskan bahwa :

“Kalau untuk *comment center* kita sudah rencanakan pengadaannya tapi karena covid 19 terpaksa ditunda dulu. Sementara untk data center kita belum ada karena keberadaan gedung pendukung. Sehingga kita masih *hosting* menggunakan tenaga swasta di Yogyakarta. Dan yang paling utama kita terkendala SDM”. Tentu hal tersebut berdampak kepada promosi pariwisata yang ada di Kabupaten Manggarai Barat”. (Wawancara dengan FZ 22 Desember 2020)

Berdasarkan hasil wawancara dengan FZ selaku kepala seksi layanan elektronik *government* Dinas Informasi dan Komunikasi Kabupaten Manggarai Barat di atas, dapat diketahui bahwa beberapa aplikasi khusus sudah disediakan untuk mendukung promosi pariwisata Labuan Bajo berbasis online. Aplikasi tersebut dari segi ketersediaan konten dan isinya merupakan tanggung jawab Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebagai penyedia konten.

Hadirnya aplikasi-aplikasi adalah sebagai wujud komitmen pemerintah dalam percepatan kinerja digitalisasi pelayanan publik. Percepatan SPBE untuk layanan publik tersebut tidak serta-merta dapat terealisasikan tanpa adanya dukungan dari ketersediaan infrastruktur jaringan IT yang memadai. Upaya-upaya tersebut dilaksanakan melalui pembangunan Pusat

Data Nasional (PDN) yang terkoneksi dan terintergrasi dalam layanan satu data. Selain ketersediaan infrastruktur IT yang memadai, juga harus dilakukan upaya-upaya standarisasi SDM yang kompeten dalam bidang IT. Inovasi layanan publik dengan pendekatan sistem kerja elektronik mengharuskan SDM aparatur pemerintah mampu menguasai bidang IT.

Hal ini tentu berdampak terhadap pemanfaatan dan penggunaan aplikasi WISMABAR (Wisata Manggarai Barat) dan aplikasi Mabar sebagai media promosi pariwisata berbasis online. Aplikasi-aplikasi ini berupa aplikasi web dan aplikasi berbasis android seperti aplikasi Wismabar dan Mabar dalam keadaan rusak tidak berfungsi atau error. Aplikasi web ini masih dapat digunakan namun masih dalam level *publish* tidak terdapat ruang interaksi secara interaktif layaknya sebuah aplikasi web yang bagus dan baik.

Sementara itu, peneliti juga melakukan wawancara dengan Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi saat ditemui di ruang kerjanya. Beliau menjelaskan bahwa :

“Terkait aplikasi untuk promosi pariwisata, kita sudah memiliki *website*. Kita masih terkendala pengelolaan dari aplikasi itu sendiri berupa isi dan konten yang ada di dalamnya. Secara teknis, aplikasi tersebut dikelola oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai Barat. Lagi-lagi terkendala di koordinasi yang tidak berjalan dengan baik. Seharusnya dibuatkan aturan khusus untuk itu, biar jelas aturan mainnya”. (Wawancara dengan DJ tanggal 16 Desember 2020)

Arah penguatan kebijakan SPBE secara terpadu dan menyeluruh dapat dilakukan dengan meningkatkan kerja sama dan koordinasi antara pusat dan daerah keikutsertaan masyarakat dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan

SPBE. Selanjutnya melakukan harmonisasi kebijakan antar tim koordinasi SPBE Nasional, pimpinan lembaga/instansi yang ada di daerah.

Berdasarkan wawancara yang telah peneliti lakukan dengan beberapa informan penelitian di atas, maka dapat dikatakan bahwa ada beberapa media online yang digunakan dalam melakukan kegiatan promosi pariwisata yang ada di Kabupaten Manggarai Barat, seperti media sosial facebook, instagram dan youtube.

Menyadari akan perbedaan pendapat terhadap hasil wawancara yang telah dikatakan oleh beberapa informan penelitian di atas, maka peneliti melakukan beberapa langkah validasi data penelitian dengan metode triangulasi. Terlepas dari itu semua, berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti selama di lapangan mendapati beberapa fenomena-fenomena terkait aktivitas promosi pariwisata berbasis online yang telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Manggarai Barat dalam hal ini adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa dari keterbatasan aplikasi khusus dan aplikasi berupa website promosi yang belum dimiliki untuk promosi pariwisata berbasis online diantisipasi dengan penggunaan media sosial seperti facebook, instagram dan youtube yang berdampak pada kunjungan wisatawan ke daerah Kabupaten Manggarai Barat khususnya Labuan Bajo sebagai ibu kota kabupaten terus mengalami trend peningkatan kunjungan dari tahun ke tahunnya dan hal ini dapat dilihat pada gambar 4.2.

Dan berikut ini beberapa hasil observasi dan analisis dokumen yang telah peneliti lakukan, sebagai berikut :

#### Gambar : 4.5 Tampilan Website Kabupaten Manggarai Barat



Sumber : Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat  
(<https://manggarai Barat kab.go.id>) tahun 2020

Berdasarkan hasil penagamatan dengan menelusuri web site di atas didapati bahwa plikasi web tersebut masih dapat digunakan namun masih dalam level *publish* tidak terdapat ruang interaksi secara interaktif layaknya sebuah aplikasi web yang bagus dan baik bagi

#### 5. Dimensi Perencanaan

Perencanaan strategis adalah suatu rencana jangka menengah yang bersifat menyeluruh, memberikan arah pandang ke depan suatu organisasi diarahkan dan bagaimana sumber daya dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional yang berdaya saing. Perencanaan strategis juga merupakan proses yang dilakukan oleh sebuah organisasi untuk menentukan strategi, arah dan acuan dalam rangka mengambil keputusan dan tindakan

yang tepat, melalui urutan prioritas dengan memperhitungkan sumber daya yang ada.

Di dalam lingkungan organisasi pemerintah, perencanaan strategis digunakan untuk memberikan arah bagi organisasi untuk mencapai tujuannya. Rencana Induk Pembanguna Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 merupakan penjabaran secara teknis terhadap Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025.

Upaya pembangunan dan pengembangan pariwisata Labuan Bajo dilakukan dengan perencanaan terintegrasi melalui :

- a) Penyiapan objek wisata
- b) Pembangunan sarana dan prasarana transportasi
- c) Pembangunan fasilitas umum dalam kawasan
- d) Penyediaan BBM dan listrik
- e) Kelembagaan dan pengembangan destinasi
- f) Koordinasi pembangunan destinasi

Gambar : 4.6 Rencana Pembangunan Pariwisata Labuan Bajo



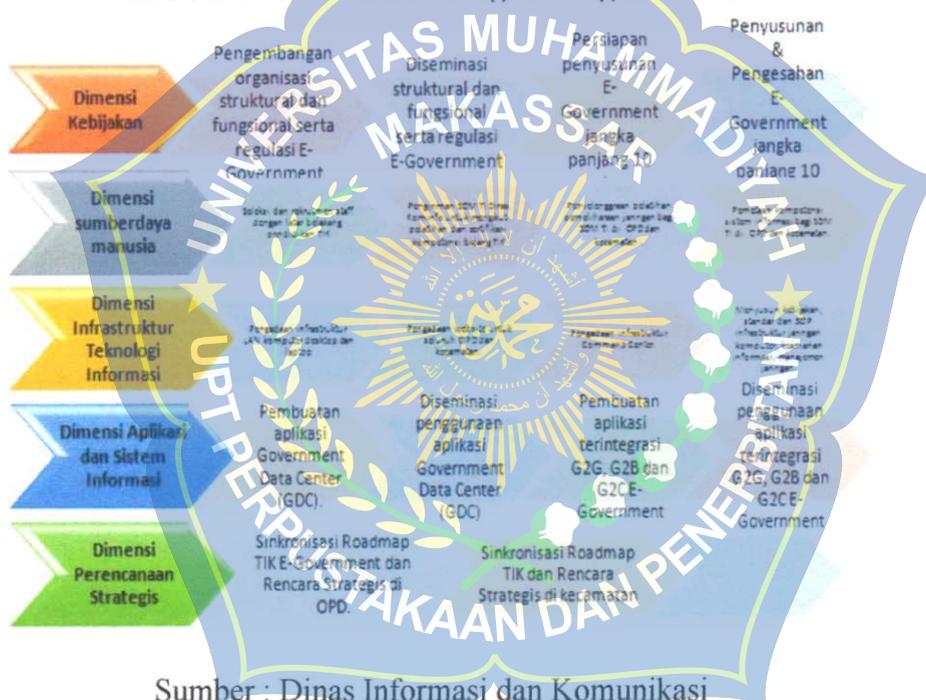
Sumber : Kementerian PPN/Bappenas tahun 2016

Berdasarkan gambar di atas, dapat diketahui bahwa ketersediaan infrastruktur IT dan kelembagaan pariwisata menjadi kunci sukses dalam upaya mendukung pembangunan dan pengembangan pariwisata Kabupaten Manggarai Barat khususnya Labuan Bajo sebagai pintu gerbang masuknya wisatawan. Oleh karena itu, transformasi layanan publik bidang pariwisata melalui sistem digital perlu dilakukan segera mungkin.

Dinas Informasi dan Komunikasi Kabupaten Manggarai Barat sebagai instansi penyelenggara dan pengembangan layanan SPBE di tingkat daerah Kabupaten Manggarai Barat dituntut untuk kerja keras dalam menyediakan infrastruktur TIK sebagai daya dukung terhadap pengembangan promosi pariwisata berbasis online. Dan berikut ini adalah program kerja dari Dinas Informasi dan Komunikasi Kabupaten Manggarai Barat :

- a) Program pelayanan administrasi perkantoran
- b) Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
- c) Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa
- d) Program fasilitas peningkatan SDM bidang komunikasi dan informatika
- e) Program kerjasama informasi dan media massa
- f) Program pengembangan data/informasi statistik daerah
- g) Program penyelenggaraan persandian daerah

**Gambar : 4.7 Rencana Pengembangan SPBE**



Sumber : Dinas Informasi dan Komunikasi Kabupaten Manggarai Barat tahun 2018

Dalam rangka mendukung promosi pariwisata berbasis online yang ada di Kabupaten Manggarai Barat, tentu harus disediakan perencanaan infrastruktur IT dan tata kelola aplikasi dan daya dukung SDM dan ketersediaan anggaran yang memadai, kelembagaan pariwisata yang berkualitas melalui perencanaan kebijakan strategis, terukur dan tepat sasaran. Dinas Pariwisata

dan Kebudayaan sebagai bagian dari kelembagaan pariwisata yang ada di Kabupaten Manggarai Barat berperan penting dalam menentukan perencanaan strategis promosi pariwisata berbasis online.

FN selaku kepala seksi promosi dan pemasaran pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai Barat mengatakan bahwa :

“Pertama, sekali lagi kami memperkuat informasi pariwisata melalui media social. Kemudian pada tahun 2021 ada rencana mau dikembangkan melalui website dan aplikasi. Juga akan melakukan kerja sama dengan instansi lain untuk pengembangan aplikasi promosi pariwisata. Dan kami juga merencanakan menggandeng pelaku usaha pariwisata untuk sama-sama melakukan promosi pariwisata Labuan Bajo”. (Wawancara dengan FN tanggal 14 Desember 2020)

Berdasarkan wawancara di atas, dapat diketahui bahwa Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai Barat berupaya mendukung pembangunan dan pengembangan pariwisata melalui promosi pariwisata berbasis online dengan pengaplikasian media sosial dan pengadaan media promosi lainnya. Transformasi cara berpikir pemerintah terhadap penyelenggaraan pemerintah harus segera dilakukan dengan pendekatan layanan publik secara digital. Inovasi layanan pemerintahan tersebut tentu harus didukung dengan menghadirkan sebuah produk kebijakan yang mengakomodir semua kebutuhan masyarakat, kalangan bisnis dan kelompok-kelompok kepentingan lainnya. Layanan pemerintahan berbasis digital tersebut adalah bentuk nyata dari visi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), sebagai berikut ini :

“Terwujudnya sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu dan menyeluruh untuk mencapai birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi”.

Perencanaan strategis yang terarah dan terukur akan dapat tercapai tentu harus melibatkan berbagai pihak dan kelompok kepentingan lainnya. Dinas Informasi dan Komunikasi sebagai penyedia layanan elektronik *government* di setiap OPD yang ada di Kabupaten Manggarai Barat tidak terkecuali Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

FZ selaku kepala seksi pelayanan *e-government* Dinas Informasi dan Komunikasi Kabupaten Manggarai Barat, menjelaskan bahwa :

“Kalau dari kami sendiri sih tinggal menindaklanjuti perencanaan pengembangan *e-government* dengan menyediakan infrastruktur TIK, pengadaan data center dan sistem penganggaran yang memadai sebagai bentuk dukung terhadap kegiatan promosi pariwisata dengan melakukan penguatan jaringan internet di setiap OPD, termasuk Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Secara teknis, untuk layanan informasi atau konten dan isi pariwisata ada di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Kami tinggal menunggu konfirmasi dan koordinasi dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai Barat terkait sarana dan prasarana apa saja yang mereka butuhkan untuk mendukung promosi pariwisata berbasis online”. (Wawancara dengan FZ tanggal 22 Desember 2020)

Berangkat dari hal tersebut, pemerintah daerah Kabupaten Manggarai Barat berupaya menjadi satu kesatuan aktor pembangunan di level daerah. Upaya-upaya pemerintah Kabupaten Manggarai Barat dalam mewujudkan cita-cita pembangunan nasional yang berdaya saing itu direalisasikan dengan menghadirkan produk kebijakan SPBE untuk penyelenggaran layanan publik secara digital. Layanan publik secara digital tersebut dituangkan dalam Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 64 Tahun 2018 Tentang Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Guna mendukung perencanaan-perencanaan di atas, Dinas Informasi dan Komunikasi Kabupaten Manggarai Barat juga berencana akan melakukan pengadaan Data Center dan Comment Center yang terpusat dan terintegrasi dalam satu big data. Pengadaan data center dan comment center tersebut sebagai upaya dalam mewujudkan cita-cita pariwisata Kabupaten Manggarai Barat kelas dunia. Kebijakan-kebijakan tentang rencana prioritas tersebut tentu harus didukung melalui ketersediaan anggaran yang memadai, standarisasi, kapasitas kelembagaan dan mendorong partisipasi swasta dan masyarakat serta kelompok-kelompok kepentingan lainnya untuk mendorong tercapainya sasaran dan tujuan penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Oleh karena itu, pemahaman visi dan misi akan menentukan keberhasilan implementasi SPBE di tingkat pemerintah daerah Kabupaten Manggarai Barat. Selain itu, perlu juga sekiranya memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait pentingnya penguasaan TIK sebagai inovasi dalam memberikan pelayanan publik khususnya bidang pariwisata.

Lebih lanjut peneliti juga melakukan wawancara dengan Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi Kabupaten Manggarai barat. Beliau mengatakan bahwa :

“Terkait untuk suksesi pengembangan kegiatan promosi pariwisata yang ada di Kabupaten Maggarai Barat, kita harus punya perencanaan SDM baik secara kualitas maupun kuantitasnya. Kemudian dari segi infrastruktur dan peralatan-peralatan yang memadai guna mendukung pengembangan pariwisata dan juga anggaran yang memadai turut menjadi faktor sukses pengembangan pariwisata Labuan Bajo”. (Wawancara dengan DJ tanggal 16 Desember 2020)

Berdasarkan wawancara dengan beberapa informan penelitian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dari dimensi perencanaan sendiri ada beberapa hal yang menjadi prioritas. Prioritas-prioritas tersebut adalah pengadaan sarana dan prasarana pendukung seperti aplikasi dan website promosi pariwisata kabupaten Manggarai Barat yang dituangkan dalam perencanaan SDM, perencanaan anggaran yang memadai dan infrastruktur-infrastruktur lainnya.

Dalam rangka mewujudkan cita-cita pembangunan nasional yang berdaya saing sebagai mana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional tahun 2005-2025, tentu harus melalui tahapan-tahapan perencanaan yang terstruktur, masif dan berkelanjutan secara konsisten dan terintegrasi. Tahapan-tahapan perencanaan tersebut tentu dapat dilakukan melalui reformasi birokrasi untuk pelayanan publik yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Akselerasi pembangunan bidang SDM aparatur pemerintah melalui pengembangan kelembagaan di level pusat maupun daerah.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Mengacu pada uraian hasil yang sebelumnya telah bahas, maka ada sejumlah point yang terkait dengan penerapan *elektronik government* sebagai media promosi pariwisata berbasis online yang ada di Kabupaten Manggarai Barat, yakni sebagai berikut :

- 1) Berkaitan dengan kebijakan penerapan *elektronik government* di bidang promosi pariwisata yang ada di Kabupaten Manggarai Barat, mengacu pada kebijakan pemerintah nomor 95 tahun 2018 terkait penyelenggaraan layanan publik dengan menggunakan media elektronik di semua level pemerintahan yang dikenal dengan sebutan (SPBE), Peraturan Bupati Kabupaten Manggarai Barat Nomor 64 Tentang Tahun 2018 Tentang Rencana Induk SPBE dan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Sistem Kepariwisata Daerah
- 2) Sementara untuk dimensi kelembagaan dalam kaitannya dengan promosi pariwisata yang ada di Kabupaten Manggarai Barat, ada dua (2) kelembagaan pariwisata yaitu Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dengan Badan Otoritas Pariwisata (BOP) Labuan Bajo Flores
- 3) Lebih lanjut dijelaskan bahwa untuk dimensi infrastruktur IT dapat dikatakan masih minim dan belum memadai dalam mendukung promosi pariwisata kabupaten Manggarai Barat berbasis online. Infrastruktur IT yang digunakan adalah dengan pemasangan kabel-kabel fayber Optik (kabel FO) di semua OPD khususnya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

dan Badan Otoritas Pariwisata (BOP) Kabupaten Manggarai Barat. Keberadaan Data Center menjadi salah satu faktor kendala promosi pariwisata berbasis online di Kabupaten Manggarai Barat.

- 4) Dimensi aplikasi untuk promosi pariwisata berbasis online yang digunakan adalah media sosial seperti facebook, intagram dan youtube. Namun untuk penggunaan website untuk promosi pariwisata masih terkendali SDM yang kompeten dalam bidangnya.
- 5) Sedangkan untuk dimensi perencanaan belum adanya kebijakan terkait perencanaan SDM baik secara kualitas maupun kuantitasnya, keterbatasan anggaran dan infrastruktur pendukung lainnya.

## **B. Saran**

Berdasarkan beberapa point kesimpulan di atas, maka peneliti dapat merekomendasikan beberapa saran yang sekiranya dapat dijadikan alternatif pemecahan masalah bagi proses pengembangan pariwisata yang ada di Kabupaten Manggarai Barat, yakni sebagai berikut :

1. Revitalisasi birokrasi, khususnya bagi lembaga, instansi atau dinas yang memiliki peran langsung dalam proses pengembangan pariwisata yang ada di Kabupaten Manggarai Barat
2. Rekrutmen SDM yang kompeten dalam bidang IT untuk promosi pariwisata dengan memanfaatkan website promosi yang mampu menjangkau wisatawan mancanegara
3. Dukungan anggaran yang memadai bagi terlaksananya promosi pariwisata yang berkelanjutan

4. Merumuskan kebijakan yang pro terhadap bidang pariwisata, mengingat Kabupaten Manggarai Barat mempunyai banyak daya tarik objek wisata berkelas premium dan super prioritas sebagai kawasan strategis wisata nasional yang disingkat dengan KSPN oleh pemerintah pusat.
5. Pengadaan Data Center untuk mengintegrasikan layanan berbasis digital
6. Pengadaan infrastruktur jaringan IT
7. Pengadaan dan pemanfaatan aplikasi sebagai media promosi pariwisata berbasis online di Kabupaten Manggarai Barat.



## DAFTAR PUSTAKA

- Amrih Rahayuningtyas, D. P., & Setyaningrum, D. (2018). Pengaruh Tata Kelola dan E-Government terhadap Korupsi. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi dan Keuangan)*, 1(4), 431. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2017.v1.i4.2597>
- Ayutiani, D. N., & Satria Putri, B. P. (2018). Penggunaan Akun Instagram Sebagai Media Informasi Wisata Kuliner. *PROfesi Humas : Jurnal Ilmiah Ilmu Hubungan Masyarakat*, 3(1), 39. <https://doi.org/10.24198/prh.v3i1.11683>
- Bessie, J. L. D. (2019). *Bessie / JOURNAL OF MANAGEMENT (SME's) Vol. 8, No.1, 2019, p45-62*. 8(1), 45–62.
- Direktorat e-Government. APTIKA - KEMKOMINFO RI (2015) PeGI Tingkat Provinsi Tahun 2015. [Online]. 2015. *Pemeringkatan e-government Indonesia (PeGI)*. Available from: [http://pegi.layanan.go.id/download/tabel\\_pegi\\_2015/2015\\_PROVINSI.PNG](http://pegi.layanan.go.id/download/tabel_pegi_2015/2015_PROVINSI.PNG).
- Ekadewi, S., & Prasetyo Wibowo Yunanto, Y. S. (2018). *PENGEMBANGAN WEBSITE DAN PEMANFAATAN MEDIA SOSIAL SEBAGAI MEDIA INFORMASI DAN PROMOSI PARIWISATA* Available at : Available at : 2(1), 9–16.
- Elisabet Yunaeti Anggaeni, Oktafianto, A. S. S. (2018). *Jurnal Cendikia Vol. XV | Cendikia 2018 Bandarlampung, April 2018 ISSN:0216-9436. cendekia, XV(April), 6–12*.
- Hutagalung, S. S., Hermawan, D., & Mulyana, N. (2019). Pendayagunaan Website Desa Sebagai Media Inovasi Desa di Desa Bernung dan Desa Sumber Jaya Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung. *Proseding Seminar Nasional Abdimas, II(2)*, 1535–1545.
- Jalma, H., Putera, R. E., & Kusdarini, K. (2019). E-Government dengan Pemanfaatan Web OpenSID dalam Pelayanan Publik di Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang. *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)*, 8(1), 24. <https://doi.org/10.31314/pjia.8.1.24-37.2019>
- Janga, A. U. (2017). Pusat Informasi Pariwisata Kabupaten Sumba Tengah Berbasis Website. *Jurnal Pariwisata Pesona*, 2(1). <https://doi.org/10.26905/jpp.v2i1.1251>
- Kalbuadi, G. A., Sunarya, Y. Y., & Murwonugroho, W. (2018). Kajian Attractiveness Promosi Budaya dalam Unsur Visual Atraktif Website Pariwisata BandungNG. *Jurnal Seni dan Reka Rancang: Jurnal Ilmiah Magister Desain*, 1(1), 19. <https://doi.org/10.25105/jsrr.v1i1.3876>

- Manek, Stefanus (2017). Pengenalan Budaya dan Pariwisata Kabupaten Belu Nusa Tenggara Timur Website. JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik Informasi), Vol. 1, No. 1 Maret 2017. Teknik Informasi, Institut Teknologi Nasional Malang
- Napitupulu, D. B. (2017). Pengujian Kerangka Kerja Pemeringkatan E-Government di Indonesia (PeGI): Studi Kasus di Tingkat Kementerian. *Jurnal Penelitian Komunikasi*, 20(1), 15–30. <https://doi.org/10.20422/jpk.v20i1.123>
- Novianti, E., & Wulung, S. R. P. (2020). Implementasi Komunikasi Daring dalam Menunjang Jawa Barat sebagai Destinasi Pariwisata Cerdas. *Jurnal Komunikasi*. <http://journal.untar.ac.id/index.php/komunikasi/article/view/6971>
- Prastiani, N., & Pratiwi, R. Z. (2020). Promosi dan pemasaran pariwisata objek wisata Tirta Sinongko dalam upaya menarik wisatawan. *Profesi Humas*. <http://journal.unpad.ac.id/profesi-humas/article/view/21311>
- Rizky, F., Frinaldi, A., & Putri, N. E. (2019). Penerapan E-Government Dalam Promosi Pariwisata Melalui Website Oleh Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Padang. *Ranah Research: Journal of* .... <https://jurnal.ranahresearch.com/index.php/R2J/article/view/85>
- Siradjuddin, H. K. (2018). Sistem Informasi Pariwisata Sebagai Media Promosi Pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Tidore Kepulauan. *IJIS - Indonesian Journal On Information System*, 3(2), 46–55. <https://doi.org/10.36549/ijis.v3i2.43>
- Sriyati, Satria, F., & dkk. (2017). Pemanfaatan E-Government Sebagai Media Promosi Di Bidang Pariwisata Ekonomi Kreatif (Studi Kasus: Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif, Kabupaten Pesawaran). *Technology Acceptance Model*, 80–87. <http://ojs.stmikpringsewu.ac.id/index.php/JurnalTam/article/view/52>
- Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: PT Alfabet.
- Sugiyono.(2008). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung : Alfabeta
- Utarki, S., Pratama, E. A., & Hellyana, C. M. (2020). Sistem Informasi Pariwisata Berbasis Website Pada Taman Nasional Gunung Ciremai Jawa Barat. 6(1), 19–32.
- Yunus, U. (2019). Digital branding : Teori dan Praktik. Bandung : Simbiosis Rekatama Media.

## Peraturan Perundang-Undangan

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025
- 2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan
- 3) Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Elektronik *Government*
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Nasional
- 5) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- 6) Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Badan Otoritas Pengelola Kawasan Pariwisata Labuan bajo Flores
- 7) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
- 8) Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 2 Tentang Sistem Kepariwisataaan daerah
- 9) Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Manggarai Barat tahun 2016-2021
- 10) Peraturan Bupati Kabupaten Manggarai Barat Nomor 64 Tahun 2018 Tentang Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

L

A

M

P

I

R

A

n







**BUPATI MANGGARAI BARAT**  
**PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**  
**PERATURAN BUPATI MANGGARAI BARAT**  
**NOMOR 57 TAHUN 2018**

**T E N T A N G**  
**PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK**  
**KABUPATEN MANGGARAI BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**BUPATI MANGGARAI BARAT**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik dan meningkatkan layanan publik perlu menerapkan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik;
  - b. bahwa dalam upaya mendorong, meningkatkan dan mengembangkan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat diperlukan arah dan kebijakan yang diatur dengan Peraturan Bupati;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4271);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara



**BUPATI MANGGARAI BARAT  
PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI MANGGARAI BARAT  
NOMOR 64 TAHUN 2018**

**TENTANG  
RENCANA INDUK SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK  
(E-GOVERNMENT) PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI MANGGARAI BARAT**

- Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam rangka mewujudkan *good governance* perlu didukung dengan suatu sistem teknologi informasi yang terpadu sesuai ketentuan Peraturan Presiden RI Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (*e-government*) Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4271);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Gedung Al-Iqra Lt.5) Makassar 90221

Telp. (0411) – 866972, Faks. (0411) – 865588

**SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT**

Pimpinan Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Yono  
Prodi : Ilmu Pemerintahan

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	12%	15 %
2	Bab 2	22%	25 %
3	Bab 3	9%	15 %
4	Bab 4	4%	10 %
5	Bab 5	0%	5 %

Dinyatakan telah **Lulus** cek plagiat yang diadakan oleh Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 24 Maret 2021

Pemeriksa,

Nursaleh Hartaman, S.IP., M.IP  
NBM. 137 4895

Mengetahui,  
Ketua Prodi

Dr. Nuryanti Mustari, S.IP., M.Si  
NBM. 103 1102

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

173/05/C.4-VIII/XI/42/2020

28 Rabiul awwal 1442 H

1 (satu) Rangkap Proposal

14 November 2020 M

Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Bapak / Ibu Bupati Manggarai Barat

Cq. Ka. Badan Kesbang, Politik & Linmas

di -

NTT

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 1117/FSP/A.1-VIII/XI/42/2020 tanggal 13 November 2020, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : **YONO**

No. Stambuk : **10564 0203314**

Fakultas : **Fakultas Sosial dan Politik**

Jurusan : **Ilmu Pemerintahan**

Pekerjaan : **Mahasiswa**

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

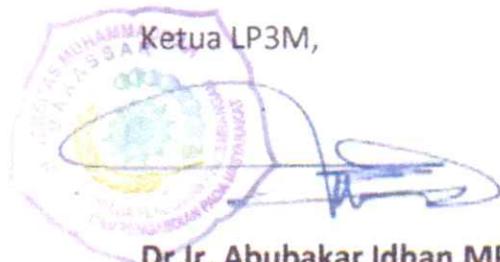
**"Penerapan electronic government sebagai media promosi pariwisata berbasis website di Kabupaten Manggarai Barat"**

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 16 Nopember 2020 s/d 16 Januari 2021.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran katziraa.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ketua LP3M,  


**Dr. Ir. Abubakar Idhan, MP.**

**NBM 101 7716**



# DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Daniel Daeng Nabit  
Telp./ Fax (0385) 2443143 Kode Pos 86754  
LABUAN BAJO - FLORES - NTT

## IZIN PENELITIAN

**Nomor : 503.707/DPMPTSP/085/XI/2020**

Berdasar : Surat Permohonan Izin Penelitian dari Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 173/05/C.4-VIII/XI/42/2020, Tanggal 14 November 2020

Menimbang : Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dimaksud, perlu dikeluarkan surat izin;

Mengingat : Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ;

Dengan ini memberikan

## IZIN PENELITIAN

Kepada :

Nama : Yono

NIM : 105640203314

Jurusan/Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Kebangsaan : Indonesia

Lembaga : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Makassar

Untuk Melakukan Penelitian di :

Lokasi : Dinas Komunikasi dan Informasi dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai Barat

Judul Penelitian : "Penerapan Electronic Government Sebagai Media Promosi Pariwisata Berbasis Website di Kabupaten Manggarai Barat".

Lama Penelitian : 16 November 2020 s/d 16 Januari 2021

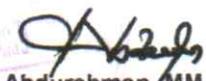
Dengan Ketentuan :

1. Wajib melaporkan maksud dan tujuan kegiatan kepada Camat setempat;
2. Selama melakukan kegiatan, yang bersangkutan tidak diperkenankan melakukan kegiatan di bidang lain;
3. Berbuat positif, tidak melakukan hal-hal yang mengganggu KAMTIBMAS setempat;
4. Wajib melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati Manggarai Barat;
5. Izin penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan diharapkan kepada pimpinan instansi Pemerintah ataupun Swasta yang dihubungi agar dapat memberikan bantuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. Setelah selesai Penelitian, wajib melampirkan surat keterangan selesai penelitian dari Kepala Desa/Lurah dan Camat.

Demikian izin penelitian ini diberikan untuk dipergunakan dan diharapkan agar pihak-pihak yang mendapattembusansurat ini memberikan bantuan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku

Ditetapkan di Labuan Bajo,  
Pada Tanggal : 27 November 2020

an. Bupati Manggarai Barat  
Kepala Dinas Penanaman Modal  
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,

  
+ **Ir. Abdurahman MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19630119 199103 1 002

**Tembusan :** disampaikan dengan hormat kepada :

1. Bupati Manggarai Barat di Labuan Bajo (Sebagai Laporan) ;
2. Wakil Bupati Manggarai Barat di Labuan Bajo ( Sebagai Laporan);
3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Manggarai Barat di Labuan Bajo;
4. Camat Komodo di Labuan Bajo ;

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



**YONO**, lahir di Terang, Desa Golo Sepang Kecamatan Boleng Kabupaten Manggarai Barat NTT pada tanggal 27 Desember 1991. Penulis adalah anak bungsu dari empat (4) bersaudara, buah kasih dari pasangan Ayahanda Sadar (almarhum) dan Ibunda Siti Hawa..

Penulis pertama kali menempuh pendidikan formal di Sekolah Dasar (SD) Inpres Cowang dan lulus pada tahun 2005. Kemudian pada tahun yang sama, penulis melanjutkan pendidikan formal di Madrasah Tsanawiah (MTs) Al-Arsy Terang dan lulus pada tahun 2008. Juga pada tahun yang sama, penulis kembali melanjutkan pendidikan formal di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) NW Hamzanwadi Nusa Jaya Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu NTB, mengambil jurusan Budidaya Ternak Unggas dan dinyatakan lulus pada tahun 2011. Sempat istirahat beberapa tahun, baru kemudian pada tahun 2014 penulis mendaftarkan diri dan terdaftar sebagai salah satu mahasiswa pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. Gelar Sarjana (S1) Ilmu Politik (S.IP) kemudian penulis raih pada tahun 2021 tepatnya pada tanggal 30 April 2021 setelah menyelesaikan sidang skripsi dengan judul : ***“Penerapan Electronic Government Sebagai Media Promosi Pariwisata Berbasis Online di Kabupaten Manggarai Barat”***.